

**PENGARUH FAKTOR - FAKTOR DEMOGRAFI DAN
KESADARAN MEMBAYAR PAJAK TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
(Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi di PT. Indah Putih
Cemerlang Wilayah Tangerang)**

SKRIPSI

Oleh :

MARYANA

20150100192

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

KONSENTRASI KEUANGAN DAN PERPAJAKAN



**FAKULTAS BISNIS
UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA TANGERANG
2019**

**PENGARUH FAKTOR – FAKTOR DEMOGRAFI DAN
KESADARAN MEMBAYAR PAJAK TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
(Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi di PT. Indah Putih
Cemerlang Wilayah Tangerang)**

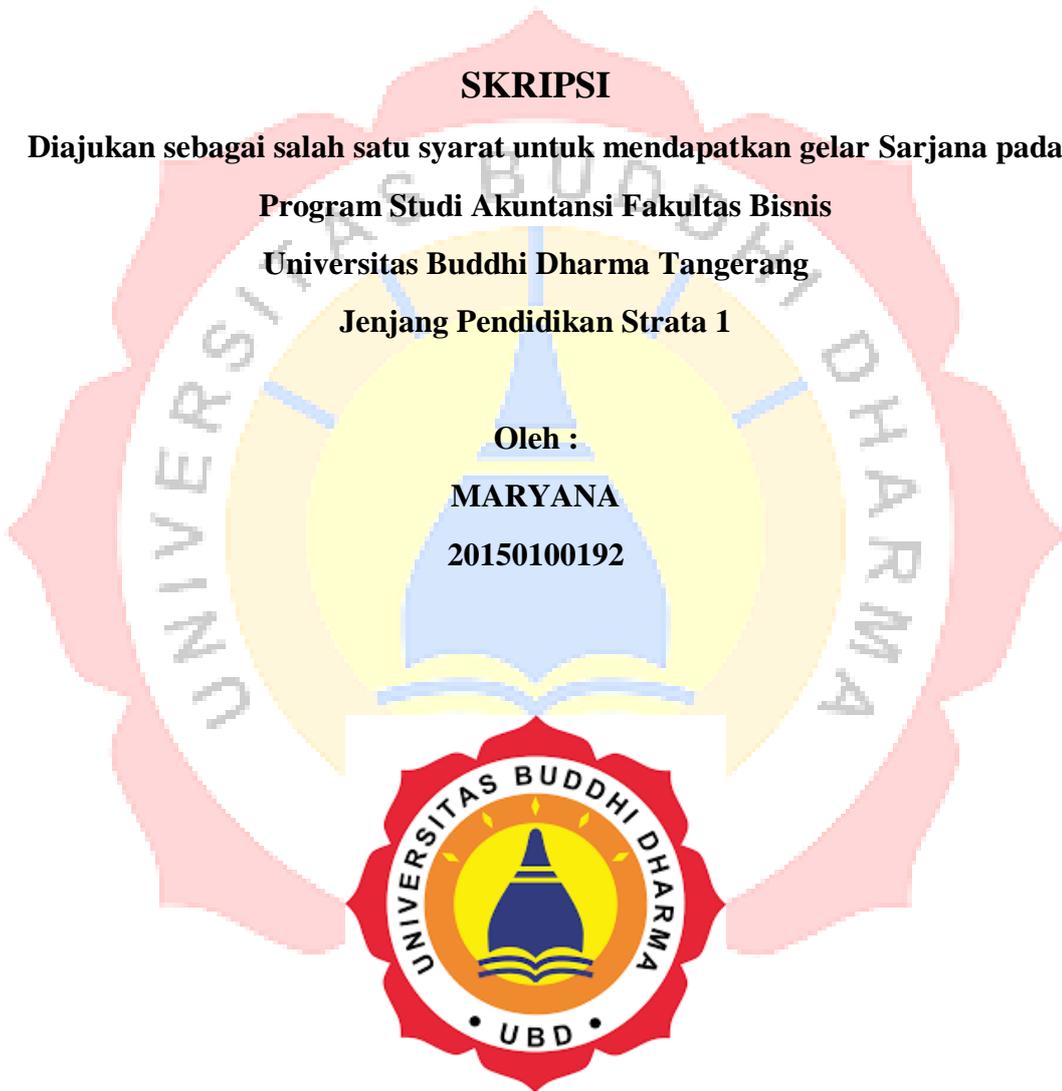
SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana pada
Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis
Universitas Buddhi Dharma Tangerang
Jenjang Pendidikan Strata 1**

Oleh :

MARYANA

20150100192



**FAKULTAS BISNIS
UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA TANGERANG
2019**

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

TANGERANG

LEMBAR PERSETUJUAN USULAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Maryana
NIM : 20150100192
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Bisnis
Judul Skripsi : Pengaruh Faktor – Faktor Demografi dan Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi di PT. Indah Putih Cemerlang Wilayah Tangerang).

Usulan skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam pembuatan Skripsi.

Menyetujui,
Pembimbing,


Susanto Wibowo, S.E., M.Akt.
NIDN : 0401016810

Tangerang, 19 September 2018

Mengetahui,
Ketua Program Studi,


Susanto Wibowo, S.E., M.Akt.
NIDN : 0401016810

**UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA
TANGERANG**

LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

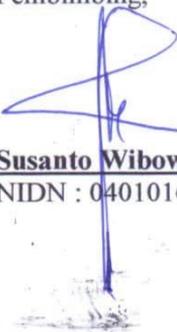
Judul Skripsi : Pengaruh Faktor – Faktor Demografi dan Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi di PT. Indah Putih Cemerlang Wilayah Tangerang).

Disusun oleh,

Nama Mahasiswa : Maryana
NIM : 20150100192
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Bisnis

Skripsi ini kami setuju untuk dipertahankan di depan Tim Penguji Universitas Buddhi Dharma sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar **Sarjana Akuntansi (S.Ak)**.

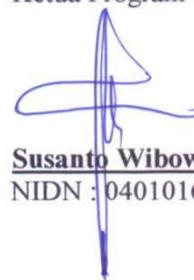
Menyetujui,
Pembimbing,



Susanto Wibowo, S.E., M.Akt.
NIDN : 0401016810

Tangerang, 05 Desember 2018

Mengetahui,
Ketua Program Studi,



Susanto Wibowo, S.E., M.Akt.
NIDN : 0401016810

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

TANGERANG

REKOMENDASI KELAYAKAN MENGIKUTI SIDANG SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Susanto Wibowo, S.E., M.Akt.

Kedudukan : Pembimbing

Menyatakan bahwa,

Nama Mahasiswa : Maryana

NIM : 20150100192

Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Bisnis

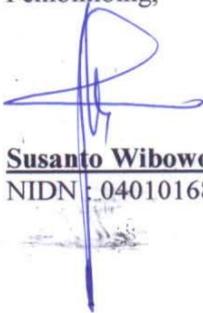
Judul Skripsi : Pengaruh Faktor – Faktor Demografi dan Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi di PT. Indah Putih Cemerlang Wilayah Tangerang).

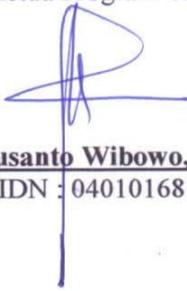
Telah layak untuk mengikuti Sidang Skripsi.

Tangerang, 05 Desember 2018

Menyetujui,
Pembimbing,

Mengetahui,
Ketua Program Studi,


Susanto Wibowo, S.E., M.Akt.
NIDN : 0401016810


Susanto Wibowo, S.E., M.Akt.
NIDN : 0401016810

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

TANGERANG

LEMBAR PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : Maryana
NIM : 20150100192
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Bisnis
Judul Skripsi : Pengaruh Faktor – Faktor Demografi Dan Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di PT. Indah Putih Cemerlang Wilayah Tangerang)

Telah dipertahankan dan dinyatakan **LULUS** pada Yudisium dalam Predikat “**SANGAT MEMUASKAN**” oleh Tim Penguji pada hari Rabu, tanggal 23 Januari 2019.

Nama Penguji

Tanda Tangan

Ketua Penguji : **Sabam Simbolon, S.E., M.M.**
NIDN : 0407025901



Penguji I : **Limajatini, S.E., M.M., BKP**
NIDN : 0413026706



Penguji II : **Rr. Dian Anggreani, S.E., M.Si.**
NIDN : 0427047303



Dekan Fakultas Bisnis,



Sutrisna, S.E., S.H., M.M., M.Kn.
NIDN : 0421077402

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Sarjana baik di Universitas Buddhi Dharma maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan original. Penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dosen pembimbing.
3. Dalam karya tulis tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis dengan jelas dan dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis, skripsi ini tidak terdapat (kebohongan) pemalsuan, seperti: buku, artikel, jurnal, data sekunder, data responden, data kuesioner, pengolahan data, dan pemalsuan tanda tangan dosen atau Ketua Program Studi atau Pembantu Ketua Bidang Akademik atau Rektor Universitas Buddhi Dharma yang dibuktikan dengan Keasliannya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas.

Tangerang, 05 Desember 2018

Yang membuat pernyataan,



Maryana

NIM : 20150100192

**PENGARUH FAKTOR – FAKTOR DEMOGRAFI DAN KESADARAN
MEMBAYAR PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
ORANG PRIBADI (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi di PT. Indah
Putih Cemerlang Wilayah Tangerang)**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan memperoleh bukti tentang pengaruh faktor – faktor demografi yaitu jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan dan kesadaran membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di PT. Indah Putih Cemerlang Wilayah Tangerang.

Penelitian ini menggunakan data primer (*primary data*). Populasi dalam penelitian ini adalah para wajib pajak orang pribadi yang bekerja di PT. Indah Putih Cemerlang Wilayah Tangerang. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode sampling jenuh yaitu sebanyak 85 orang. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner. Penelitian ini menggunakan uji kualitas data yaitu validitas dan reliabilitas, analisis deskriptif statistik, uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, heteroskedastisitas dan multikolinieritas, analisis regresi linear berganda, koefisien determinasi (R^2), uji Signifikansi parameter individual (uji statistik t), dan uji signifikansi simultan (uji statistik F).

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan maka diperoleh kesimpulan bahwa secara parsial jenis kelamin (X1) memiliki nilai signifikan sebesar $0,369 > 0,05$ untuk laki – laki dan nilai signifikan sebesar $0,359 > 0,05$ untuk perempuan, tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y), usia (X2) memiliki nilai signifikan sebesar $0,719 > 0,05$ untuk usia muda (< 30 tahun) dan nilai signifikan sebesar $0,485 > 0,05$ untuk usia tua (> 31 tahun), tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y). Tingkat pendidikan (X3) memiliki nilai signifikan sebesar $0,698 > 0,05$ untuk pendidikan rendah ($< SMA$) dan nilai signifikan sebesar $0,388 > 0,05$ untuk pendidikan tinggi ($> D3$) tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y). Kesadaran membayar pajak (X4) memiliki nilai signifikan sebesar $0,05 \leq 0,05$, berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y). Sedangkan secara simultan jenis kelamin (X1) baik laki – laki maupun perempuan, usia (X2) baik usia muda maupun usia tua, tingkat pendidikan (X3) baik pendidikan rendah maupun pendidikan tinggi dan kesadaran membayar pajak (X4) secara bersama – sama memiliki nilai signifikan sebesar $0,393 > 0,05$, tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y).

Kata kunci : Jenis Kelamin, Usia, Tingkat Pendidikan, Kesadaran Membayar Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

**THE INFLUENCE OF DEMOGRAPHIC FACTORS AND AWARENESS OF
PAYING TAXES ON INDIVIDUAL TAXPAYER COMPLIANCE (Individual
Taxpayer at PT. Indah Putih Cemerlang Area of Tangerang)**

ABSTRACT

This study aims to examine and obtain evidence about the influence demographic factors, namely gender, age, level of education and awareness of paying taxes on individual taxpayer compliance at PT. Indah Putih Cemerlang Area of Tangerang.

This study uses primary data. The population in this study were individual taxpayers working at PT. Indah Putih Cemerlang Area of Tangerang. Sampling is done by saturation sampling method, which is as many as 85 people. Methods of collecting data using a questionnaire. This study uses a test of data quality, namely validity and reliability, descriptive statistical analysis, classic assumption test, namely normality, heteroscedasticity and multicollinearity test, multiple linear regression analysis, determination coefficient (R²), test of parameter significance individual (statistical test t), and simultaneous significance test (F statistical test).

Based on the results of the research that has been done, it can be concluded that partially gender (X1) has a significant value of 0,369 > 0,05 for men and a significant value of 0,359 > 0,05 for women, does not significantly influence people's taxpayer compliance personal (Y), age (X2) has a significant value of 0,719 > 0,05 for young age (<30 years) and a significant value of 0,485 > 0,05 for old age (>31 years), does not significantly influence individual taxpayer compliance (Y) The level of education (X3) has a significant value of 0,698 > 0,05 for low education (<SMA) and a significant value of 0,388 > 0,05 for higher education (>D3) does not significantly influence individual taxpayer compliance (Y). Tax paying awareness (X4) has a significant value of 0,05 ≤ 0,05 significantly influencing individual taxpayer compliance (Y). While simultaneously gender (X1) is good - male and female, age (X2) both young and old, education level (X3) both low education and higher education and awareness of paying taxes (X4) together have value significant at 0,393 > 0,05, no significant effect on individual taxpayer compliance (Y).

Keywords : Gender, Age, Education Level, Tax Paying Awareness, Individual Taxpayer Compliance.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENGARUH FAKTOR – FAKTOR DEMOGRAFI DAN KESADARAN MEMBAYAR PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi di PT. Indah Putih Cemerlang Wilayah Tangerang)”**. Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Bisnis Universitas Buddhi Dharma Tangerang.

Penulis menyadari bahwa keberhasilan penulisan skripsi ini tidak lepas dari dorongan, bantuan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh sebab itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. KPH Harimurti Kridalaksana, Selaku Rektor Universitas Buddhi Dharma Tangerang.
2. Bapak Sutrisna, S.E., S.H., M.M., M.Kn. Selaku Dekan Fakultas Bisnis Universitas Buddhi Dharma Tangerang.
3. Bapak Susanto Wibowo, S.
4. E., M.Akt. Selaku Ketua Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Bisnis Universitas Buddhi Dharma Tangerang.
5. Bapak Susanto Wibowo, S.E., M.Akt. Selaku Dosen Pembimbing atas ketulusan hati dan kesabarannya dalam membimbing, mendukung dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak Ir. Hartono Dermawan, Selaku Direktur PT. Indah Putih Cemerlang Wilayah Tangerang yang telah memberikan ijin penelitian serta membantu memberikan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
7. Orang tua dan Keluarga tercinta yang senantiasa memberikan doa, motivasi dan dukungan selama penyusunan skripsi ini.
8. Kepada teman – teman tercinta dan teman seperjuangan, Meriah Freskila Viska, Shinta Jarto, Selen, dan Dian yang senantiasa saling membantu, saling memberikan semangat dan saling merangkul saat penulis kehilangan semangat selama penyusunan skripsi ini.
9. Seluruh Staff dan Karyawan PT. Indah Putih Cemerlang Wilayah Tangerang Selaku responden, dan pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu hingga terselesaikannya skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan penelitian serta pengalaman penulis. Oleh karena itu, dengan segenap kerendahan hati penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun dari semua pihak. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi semua pihak.

Tangerang, 05 Desember 2018



(Maryana)

NIM: 20150100192

DAFTAR ISI

Halaman

JUDUL LUAR	
JUDUL DALAM	
LEMBAR PERSETUJUAN USULAN SKRIPSI	
LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	
REKOMENDASI KELAYAKAN MENGIKUTI SIDANG	
LEMBAR PENGESAHAN	
SURAT PERNYATAAN	
ABSTRAK.....	i
<i>ABSTRACT</i>	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GRAFIK.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	9
C. Rumusan Masalah	10
D. Batasan Masalah	11

E. Tujuan Penelitian.....	12
F. Manfaat Penelitian.....	13
G. Sistematika Penulisan Penelitian	13
BAB II LANDASAN TEORI.....	15
A. Gambaran Umum Teori	15
1. Definisi Pajak.....	15
2. Fungsi Pajak.....	16
3. Syarat Pemungutan Pajak.....	17
4. Jenis dan Penggolongan Pajak	18
5. Tata Cara Pemungutan Pajak	20
6. Asas Pemungutan Pajak	21
7. Sistem pemungutan Pajak	22
8. Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan	23
9. Hukum Pajak.....	25
10. Kedudukan Hukum	26
11. Hambatan Pemungutan Pajak.....	27
12. Objek Pajak.....	28
13. Pengertian Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21	28
14. Perhitungan Umum Pajak Penghasilan Pasal 21	29
15. Teori Atribusi	30
16. Teori Perilaku Yang Direncanakan.....	31
B. Variabel – variabel Penelitian	31
1. Demografi	32

a. Jenis Kelamin	32
b. Usia	34
c. Tingkat Pendidikan.....	35
2. Kesadaran Membayar Pajak	37
3. Kepatuhan Wajib Pajak	38
C. Peneliti Terdahulu	40
D. Kerangka Pemikiran.....	53
E. Hipotesis Penelitian.....	54
1. Hubungan Jenis Kelamin terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	54
2. Hubungan Usia terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	55
3. Hubungan Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	56
4. Hubungan Kesadaran Membayar Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.....	57
5. Hubungan Jenis Kelamin, Usia, Tingkat Pendidikan dan Kesadaran Membayar Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	58
BAB III METODE PENELITIAN.....	60
A. Gambaran Umum Perusahaan	60
1. Sejarah Perusahaan	60
2. Visi dan Misi PT. Indah Putih Cemerlang	61

3. Arti dan Makna Logo PT.Indah Putih Cemerlang	61
4. Struktur Organisasi PT.Indah Putih Cemerlang	62
B. Objek Penelitian	62
C. Metode Penelitian.....	63
1. Tipe Penelitian	64
D. Definisi Operasional Variabel	65
1. Variabel Terikat	66
a. Kepatuhan Wajib Pajak	66
2. Variabel Bebas	67
a. Faktor Demografi	67
3. Skala Pengukuran	68
E. Populasi dan Sampel	74
1. Populasi.....	74
2. Sampel	74
F. Metode Pengumpulan Data	75
G. Teknik Analisis Data.....	75
1. Uji Kualitas Data	75
a. Uji Validitas	76
b. Uji Reliabilitas	76
2. Analisis Deskriptif Statistik	77
3. Uji Asumsi Klasik	78
a. Uji Normalitas	78
b. Uji Multikolinieritas.....	79

c. Uji Heteroskedastisitas	79
4. Analisis Regresi Linear Berganda	80
5. Koefisien Determinasi (R^2)	81
6. Uji Hipotesis	81
a. Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t).....	81
b. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)	82
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	83
A. Analisis dan Pembahasan	83
1. Statistik Deskriptif Kuesioner	83
2. Statistik Deskriptif Responden	83
a. Statistik Deskriptif Responden Berdasarkan Jenis Kelamin ...	84
b. Statistik Deskriptif Responden Berdasarkan Usia	84
c. Statistik Deskriptif Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan	85
d. Statistik Deskriptif Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan	86
e. Statistik Deskriptif Responden Berdasarkan Status Pernikahan	86
f. Statistik Deskriptif Responden Berdasarkan kepemilikan NPWP	87
B. Hasil Olah Data Uji Statistik Deskriptif Data	87
C. Hasil Olah Data Uji Validitas dan Reliabilitas	93
1. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas Kesadaran Membayar Pajak	

.....	94
2. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.....	97
D. Hasil Olah Data Uji Asumsi Klasik	99
1. Uji Normalitas.....	99
2. Uji Multikolinieritas	101
3. Uji Heteroskedastisitas	102
E. Hasil Olah Data Uji Analisis Regresi Linear Berganda	103
F. Hasil Olah Data Uji Koefisien Determinasi R Square.....	108
G. Hasil Olah Data Uji Hipotesis.....	109
1. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t).....	109
2. Uji Signifikan Simultan (Uji Statistik F).....	112
H. Pembahasan Hasil Uji Hipotesis	113
BAB V PENUTUP	117
A. Kesimpulan	117
B. Keterbatasan Penelitian	118
C. Saran.....	118

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

SURAT KETERANGAN RISET

LAMPIRAN - LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Jumlah Wajib Pajak Dalam Penyampaian SPT Tahunan	3
Tabel I.2	Daftar Karyawan PT. Indah Putih Cemerlang yang Memiliki NPWP Dan Tidak Memiliki NPWP Tahun 2013 - 2018	6
Tabel II.1	Hasil Penelitian Terdahulu	40
Tabel III.1	Skala Nominal Jenis Kelamin	68
Tabel III.2	Skala Nominal Usia	68
Tabel III.3	Skala Nominal Tingkat Pendidikan	69
Tabel III.4	Skala <i>Likert</i> Kesadaran Membayar Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	69
Tabel III.5	Operasional Variabel	70
Tabel IV.1	Distributor Kuesioner	83
Tabel IV.2	Statistik Deskriptif Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	84
Tabel IV.3	Statistik Deskriptif Responden Berdasarkan Usia	85
Tabel IV.4	Statistik Deskriptif Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan	86
Tabel IV.5	Statistik Deskriptif Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan	86
Tabel IV.6	Statistik Deskriptif Responden Berdasarkan Status Pernikahan	87
Tabel IV.7	Statistik Deskriptif Responden Berdasarkan Kepemilikan NPWP	87
Tabel IV.8	Hasil Olah Data Uji Statistik Deskriptif Jenis Kelamin	88
Tabel IV.9	Hasil Olah Data Uji Statistik Deskriptif Usia	88
Tabel IV.10	Hasil Olah Data Uji Statistik Deskriptif Tingkat Pendidikan	89

Tabel IV.11 Hasil Olah Data Uji Statistik Deskriptif Pernyataan Kesadaran Membayar Pajak	90
Tabel IV.12 Hasil Olah Data Uji Statistik Deskriptif Pernyataan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	91
Tabel IV.13 Hasil Olah Data Uji Statistik Deskriptif Jenis Kelamin, Usia, Tingkat Pendidikan dan Kesadaran Membayar Pajak.....	92
Tabel IV.14 Hasil Olah Data Uji Validitas Kesadaran Membayar Pajak	94
Tabel IV.15 Hasil Olah Data Uji Reliabilitas Kesadaran Membayar Pajak	96
Tabel IV.16 Hasil Olah Data Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	97
Tabel IV.17 Hasil Olah Data Uji Reliabilitas Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.....	98
Tabel IV.18 Hasil Olah Data Uji Normalitas Data	100
Tabel IV.19 Hasil Olah Data Uji Multikolinieritas.....	101
Tabel IV.20 Hasil Olah Data Uji Regresi Linear Berganda.....	105
Tabel IV.21 Hasil Olah Data Uji Koefisien Determinasi	108
Tabel IV.22 Hasil Olah Data Uji t.....	110
Tabel IV.23 Hasil Olah Data Uji F	113

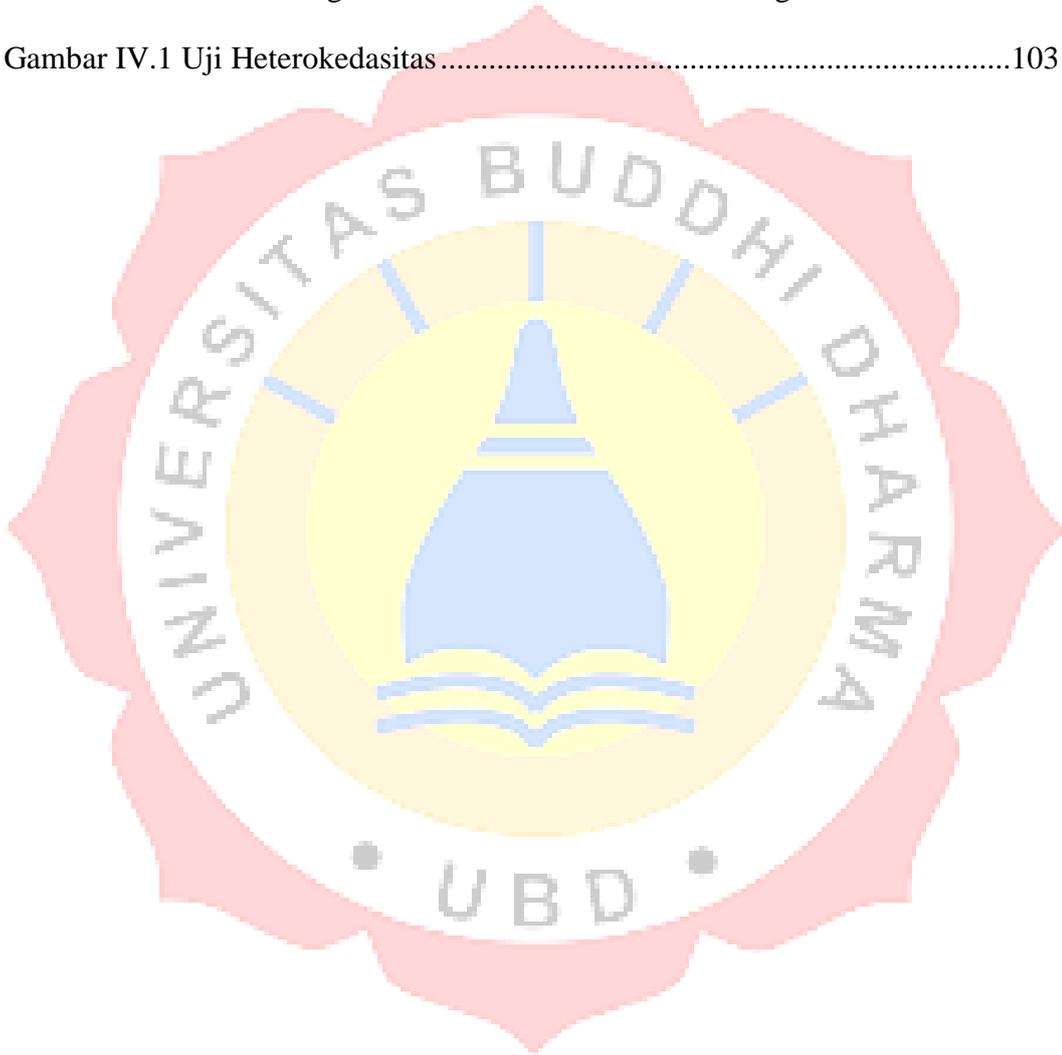
DAFTAR GRAFIK

Grafik I.1	Penerimaan Pajak terhadap Negara	2
Grafik I.2	Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	4



DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Kerangka Pemikiran	53
Gambar III.1 Logo PT. Indah Putih Cemerlang.....	61
Gambar III.2 Struktur Organisasi PT. Indah Putih Cemerlang.....	62
Gambar IV.1 Uji Heterokedasitas	103



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Kuesioner Penelitian
- Lampiran 2 Tabel Hasil Jawaban Responden
- Lampiran 3 Hasil Pengelolaan Penelitian dengan *SPSS 20*
- Lampiran 4 Tabel r
- Lampiran 5 Tabel F
- Lampiran 6 Tabel t



BAB I

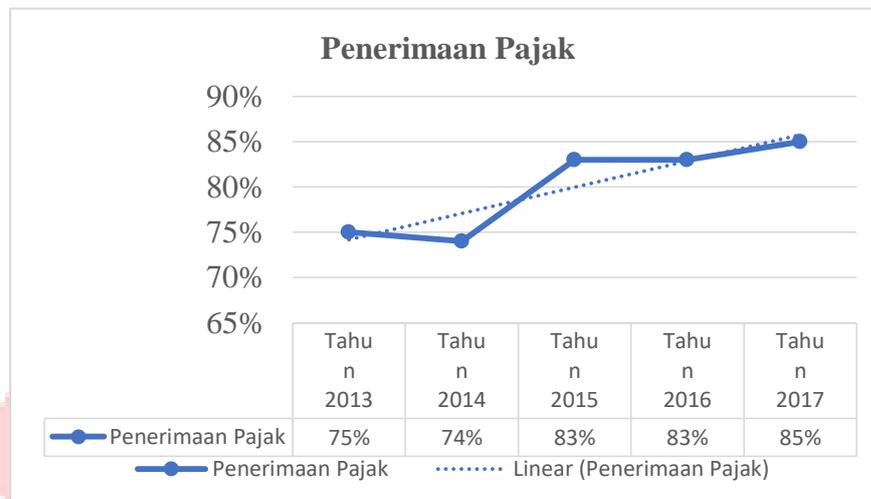
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Nyoman Dantes (2012, 161) dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian. Latar belakang diperlukan agar orang dapat memahami konteks atau lingkungan faktor - faktor yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dan dibawah ini merupakan permasalahan dalam penelitian ini.

Indonesia adalah bangsa yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap warga negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang - undang Dasar 1945. Oleh sebab itu, perpajakan ditempatkan negara sebagai perwujudan kewajiban kenegaraan dalam rangka peran aktif masyarakat untuk membiayai pembangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak (Kakunsi, Pangemanan, Pontoh (2017) karena kontribusi penerimaan pajak dalam negara sangat berdampak besar, besarnya penerimaan pajak negara dapat dilihat dalam Grafik I.1 sebagai berikut.

Grafik I.1
Penerimaan Pajak Terhadap Negara



Sumber : Badan Pusat Statistik (Diolah Kembali Oleh Penulis)

Berdasarkan data yang didapat dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa sumber dana negara paling banyak didapat dari penerimaan pajak terlihat pada Grafik I.1 bahwa jumlah penerimaan pajak dari tahun 2013 – 2017 mengalami peningkatan yang cukup signifikan walaupun, pertumbuhannya hanya sedikit bertambah yaitu sebesar 75%, 74%, 83%, 83% dan 85% dengan arti bahwa pajak sangat berpengaruh dan berperan penting dalam pembangunan negara, hal ini menunjukkan bahwa negara yang memiliki kemajuan dan kesejahteraan dalam hal pembangunan adalah negara yang memiliki warga negara yang patuh akan pajak dan memiliki tingkat kesadaran pajak yang tinggi, sehingga hutang negara menjadi berkurang karena negara memiliki pendapatan yang tinggi.

Saat ini, pemerintah Indonesia sedang berjuang dan berusaha untuk meningkatkan pembangunan baik dalam hal sarana maupun prasarana agar

Indonesia bisa berubah dari negara berkembang menjadi negara maju. Ada banyak hal yang menjadi fokus pemerintah dalam hal ini salah satunya yaitu kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang merupakan faktor yang berdampak besar untuk sumber pembangunan negara, karena jika kepatuhan wajib pajak orang pribadi meningkat maka pendapatan pajak bertambah dan hal ini dapat mengakibatkan meningkatnya penerimaan pajak, tetapi kenyataannya tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi masih sangat rendah hal ini dapat dilihat dalam Tabel I.1 berikut ini.

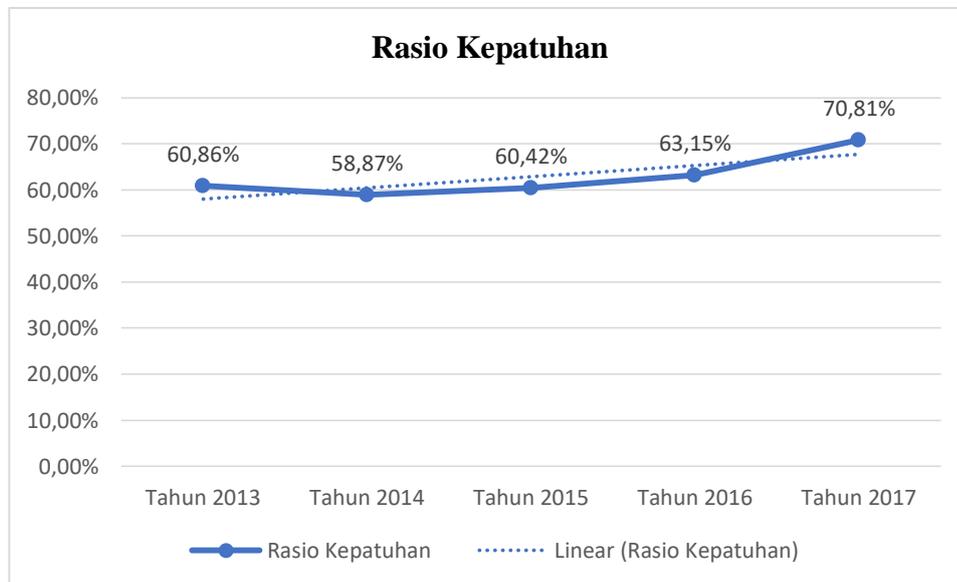
Tabel I.1
Jumlah Wajib Pajak Dalam Penyampaian SPT Tahunan

	2013	2014	2015	2016	2017
WP terdaftar	17.731.736	18.357.833	18.159.840	20.165.718	17.653.963
Wajib SPT					
SPT Tahunan	10.790.650	10.807.624	10.972.529	12.735.463	12.501.362

Sumber : Direktorat Jenderal Pajak (Diolah Kembali Oleh Penulis)

Dilihat dari data Tabel I.1 bahwa tahun 2013 – tahun 2017 terjadi penurunan jumlah wajib pajak yang terdaftar dalam penyampaian SPT Tahunan jumlah ini berbanding terbalik dengan jumlah wajib pajak yang terdaftar hal ini berarti kepatuhan wajib pajak orang pribadi masih sangat rendah dan berpengaruh pada tingkat rasio kepatuhan wajib pajak yang dapat dilihat pada Grafik I.2 dibawah ini.

Grafik I.2
Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi



Sumber : Direktorat Jenderal Pajak (Diolah Kembali Oleh Penulis)

Akibat tingkat pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi yang sangat rendah maka berdampak pada tingkat rasio kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan masih sangat rendah dan berdampak pada tidak optimalnya penerimaan pajak pada pendapatan negara karena ditentukan oleh besarnya pendapatan pajak. Seharusnya dengan banyaknya jumlah wajib pajak terdaftar maka penerimaan negara dari perpajakan diharapkan dapat mencapai target tetapi kenyataannya penerimaan perpajakan belum bisa mencapai target. Rendahnya kepatuhan dan kesadaran wajib pajak baik dalam penyampaian SPT Tahunan maupun dalam hal lainnya dikarenakan banyak faktor salah satunya yaitu kurangnya kesadaran wajib pajak tentang manfaat yang dihasilkan dari pajak antara lain, fasilitas pendidikan, fasilitas transportasi, fasilitas kesehatan sarana dan

prasarana umum. Untuk mengatasi permasalahan diatas, ada banyak cara yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang pertama menerapkan pembaharuan sistem pemungutan pajak dengan *self-assessment system*.

Sejalan dengan reformasi perpajakan (*tax reform*) tahun 1983 yang menghasilkan perubahan yang mendasar pada sistem dan mekanisme pemungutan pajak (dari *official assessment* menjadi *self assessment system*), dimana dalam hal ini wajib pajak yang harus aktif dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, mulai dari mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, menghitung, memperhitungkan, membayar serta melaporkan pajaknya dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT). Sistem *self assessment* memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak, maka selayaknya diimbangi dengan adanya pengawasan yang diberikan tidak disalahgunakan. Ini menjadikan tugas Direktorat Jenderal Pajak untuk menetapkan pajak setiap wajib pajak menjadi berkurang. Dalam prinsip *self assesment system*, penentuan besarnya pajak terutang dipercayakan kepada wajib pajak sendiri melalui Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikan menuntut wajib pajak untuk melakukan kewajiban pajaknya secara mandiri dan pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak hanya berfungsi sebagai pengawas. Keputusan dalam memenuhi kewajiban pajak atau kepatuhan terhadap pajak akan sepenuhnya diserahkan kepada wajib pajak (Anthony, 2018).

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini terbagi menjadi dua dimana masalah yang dijelaskan diatas merupakan masalah yang diambil

oleh penulis secara umum tentang kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Indonesia dan masalah khusus yang diambil oleh penulis adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi di PT. Indah Putih Cemerlang, berikut data – data yang diperoleh oleh penulis dari PT. Indah Putih Cemerlang berikut ini karyawan yang memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan yang tidak memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dalam enam tahun terakhir dalam Tabel I.2 dibawah ini.

Tabel I.2
Daftar Karyawan Memiliki NPWP dan Tidak Memiliki NPWP
di PT. Indah Putih Cemerlang Tahun 2013 – 2018

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Memiliki NPWP	68	72	73	80	82	85
Tidak Memiliki NPWP	72	74	77	77	80	80
Jumlah	140	146	150	157	162	165

Sumber : Data Diolah Penulis (2018)

Dilihat dari data pada tabel I.2 pada tahun 2013 – 2015 karyawan yang memiliki NPWP lebih sedikit dibandingkan yang tidak memiliki NPWP dan sudah dapat dipastikan bahwa kepatuhan wajib pajak sangat rendah akan tetapi pada tahun 2016 - 2018 seiring dengan bertambahnya karyawan memiliki pengaruh dimana jumlah karyawan yang memiliki NPWP meningkat. Dapat disimpulkan bahwa dari tahun ketahun jumlah

karyawan PT. Indah Putih cemerlang semakin meningkat dan karyawan yang memiliki NPWP pun ikut bertambah dengan perubahan tersebut diharapkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi ikut meningkat. Akan tetapi, sistem pemotongan pajak yang diterapkan dalam PT. Indah Putih Cemerlang bukan *Withholding System*, dimana yang dimaksud dengan *Withholding System* menurut Direktorat Jenderal Pajak adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh wajib pajak dimana yang dimaksud pihak ketiga disini bukan fiskus atau wajib pajak yang bersangkutan melainkan suatu organisasi seperti perusahaan, jika sistem ini yang diterapkan maka sudah dipastikan semua karyawan memiliki kepatuhan pajak yang baik sedangkan sistem yang diterapkan disini adalah *Self Assessment System* dimana menurut Dirjen Pajak *Self Assessment System* yaitu dimana wajib pajak sendiri yang menghitung, menyetor dan melaporkan pajak terutangnya yang bisa disampaikan secara *online* dan *realtime*. Dengan diterapkan sistem tersebut kemungkinan besar banyak wajib pajak yang tidak patuh dikarenakan masih kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, hal ini yang menjadi alasan dasar penulis melakukan studi pada wajib pajak orang pribadi di PT. Indah Putih Cemerlang.

Jika dilihat dari masalah umum, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa negara indonesia memiliki tingkat penghasilan pajak yang rendah (Sarasdiyanto, 2017). Oleh karena itu peneliti menggunakan tema kepatuhan

wajib pajak orang pribadi. Kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan pemenuhan pajak merupakan fenomena yang penting untuk diteliti, dengan begitu peneliti dapat melihat faktor apa saja yang mempengaruhi wajib pajak orang pribadi tidak patuh dalam melaksanakan pemenuhan membayar pajak.

Faktor yang mempengaruhi kepatuhan perpajakan di Indonesia salah satunya adalah faktor-faktor demografi seperti : jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, status pernikahan, jenis pekerjaan, tingkat penghasilan, budaya etnik, keperilakuan sehari-hari, dan sebagainya. Penelitian tentang pengaruh faktor-faktor demografi seperti jenis kelamin, usia dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan perpajakan di Indonesia telah dilakukan sebelumnya oleh Pasaribu dan Tjen (2015) dan Sarasdiyanto (2017) dan hasil penelitian Pasaribu dan Tjen (2015) serta Sarasdiyanto (2017) menyatakan bahwa faktor jenis kelamin dan tingkat pendidikan berpengaruh signifikan dan penelitian Sarasdiyanto (2017) menyatakan bahwa faktor usia juga berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH FAKTOR – FAKTOR DEMOGRAFI DAN KESADARAN MEMBAYAR PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi di PT. Indah Putih Cemerlang Wilayah Tangerang)”**.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Sarasdiyanto (2017) dan memiliki perbedaan dengan peneliti sebelumnya. Perbedaan penelitian ini yaitu menghilangkan satu variabel faktor demografi yaitu status pernikahan karena hasil penelitian variabel ini dengan peneliti terdahulu seperti Mahmudah (2017) dan Anthony (2018) yang hasilnya konsisten bahwa status pernikahan tidak mempengaruhi wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak. Perbedaan selanjutnya yaitu lokasi dan responden penelitian yang akan diteliti yaitu wajib pajak orang pribadi di PT. Indah Putih Cemerlang sedangkan lokasi penelitian Sarasdiyanto (2017) wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Purworejo, maka dari itu peneliti memilih lokasi di Wilayah Tangerang sesuai dengan lokasi PT. Indah Putih Cemerlang. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti apakah terdapat pengaruh signifikan dari faktor – faktor demografi dan kesadaran membayar pajak berdasarkan penelitian sebelumnya terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di PT. Indah Putih Cemerlang Wilayah Tangerang. Faktor – faktor demografi tersebut adalah jenis kelamin, usia dan tingkat pendidikan serta kesadaran membayar pajak.

B. Identifikasi Masalah

Menurut Sudaryono (2017, 105) dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian. Identifikasi masalah pada umumnya mendeteksi, melacak, menjelaskan aspek permasalahan yang muncul dan berkaitan dari judul penelitian atau dengan masalah atau variabel yang akan diteliti.

Berdasarkan latar belakang diatas maka identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Karyawan PT. Indah Putih Cemerlang terdiri dari laki – laki dan perempuan.
2. Usia karyawan PT. Indah Putih Cemerlang berbeda – beda.
3. Tingkat pendidikan karyawan di PT . Indah Putih Cemerlang berbeda – beda.
4. PT. Indah Putih Cemerlang masih menggunakan *Self Assessment System* sehingga dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan kesadaran membayar pajak.

C. Rumusan Masalah

Menurut Nyoman Dantes (2012, 162) dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian, pada penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif, lazimnya perumusan masalah menggunakan kalimat pertanyaan, sehingga perumusan masalah dapat diukur. Berdasarkan identifikasi masalah diatas maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah secara parsial jenis kelamin berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di PT. Indah Putih Cemerlang Wilayah Tangerang ?
2. Apakah secara parsial usia berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di PT. Indah Putih Cemerlang Wilayah Tangerang ?

3. Apakah secara parsial tingkat pendidikan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di PT. Indah Putih Cemerlang Wilayah Tangerang ?
4. Apakah secara parsial kesadaran membayar pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di PT. Indah Putih Cemerlang Wilayah Tangerang ?
5. Apakah secara simultan jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan dan kesadaran membayar pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di PT. Indah Putih Cemerlang Wilayah Tangerang ?

D. Batasan Masalah

Menurut Sugiyono (2004, 303) dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian Bisnis, digunakan peneliti untuk memberi batasan, variabel apa saja yang akan diteliti, serta bagaimana hubungan variabel satu dengan variabel yang lainnya. Pembatasan masalah pada penelitian ini dilakukan dengan tujuan agar saat proses penelitian hanya fokus pada permasalahan yang telah ditetapkan. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Responden penelitian adalah wajib pajak orang pribadi dengan berbagai latar belakang dan status di PT. Indah Putih Cemerlang Wilayah Tangerang.
2. Variabel bebas penelitian ini adalah jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan dan kesadaran membayar pajak. Variabel terikat pada penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

E. Tujuan Penelitian

Menurut Nyoman Dantes (2012, 162) dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian. Tujuan penelitian merupakan mencari informasi empiris, objektif, dan logis mengenai sesuatu atau menentukan keterkaitan antara variabel -variabel yang tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah secara parsial jenis kelamin berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di PT. Indah Putih Cemerlang Wilayah Tangerang.
2. Untuk mengetahui apakah secara parsial usia berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di PT. Indah Putih Cemerlang Wilayah Tangerang.
3. Untuk mengetahui apakah secara parsial tingkat pendidikan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di PT. Indah Putih Cemerlang Wilayah Tangerang.
4. Untuk mengetahui apakah secara parsial kesadaran membayar pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di PT. Indah Putih Cemerlang Wilayah Tangerang.
5. Untuk mengetahui apakah secara simultan jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan dan kesadaran membayar pajak berpengaruh signifikan

terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di PT. Indah Putih Cemerlang Wilayah Tangerang.

F. Manfaat Penelitian

Menurut Sudaryono (2017, 119) dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian, manfaat penelitian yaitu dampak dari tercapainya tujuan. Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah, maka manfaat penelitian ini adalah :

1. Bagi Direktorat Jenderal Pajak, Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk meningkatkan sistem dan peraturan pajak agar kepatuhan pajak meningkat.
2. Bagi Peneliti lain, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian penelitian selanjutnya mengenai pengaruh faktor-faktor demografi dan kesadaran membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3. Bagi Wajib Pajak, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan informasi bagi para pihak terutama wajib pajak agar lebih patuh membayar pajak.

G. Sistematika Penulisan Penelitian

Menurut Sudaryono (2017, 42) dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian, peneliti dapat dengan jelas menelusuri arah pikiran penyusunan untuk merealisasikan. Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai

penelitian yang dilakukan, maka disusunlah suatu sistematika penulisan yang berisi informasi mengenai materi dan hal-hal yang dibahas dalam tiap-tiap bab. Adapun penelitian ini dibagi menjadi lima bagian dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan penelitian.

BAB II : LANDASAN TEORI

Dalam bab ini menjelaskan tentang landasan teori dan penelitian terdahulu, kerangka penelitian dan hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan dibahas mengenai objek penelitian, metode penelitian, tipe penelitian, definisi operasional variabel, variabel penelitian, penentuan populasi dan sample, dan metode pengumpulan data,.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dibahas mengenai deskripsi objek penelitian, deskripsi statistik data, analisis data dan hasil olah data.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran penelitian.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Gambaran Umum Teori

1. Definisi Pajak

Menurut Siti Resmi (2011, 1) dalam bukunya yang berjudul Perpajakan Teori dan Kasus. Pajak menurut (Rochmat Soemitra 2011, 1) menyatakan bahwa :

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang – undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Definisi tersebut kemudian disempurnakan, menjadi :

“Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus” nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*”.

Pajak Menurut (S. I. Djajadiningrat 2011, 1) menyatakan bahwa :

“Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum”.

Pajak Menurut (N. J.Feldmann 2011, 2) menyatakan bahwa :

“Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran – pengeluaran umum”.

Dari Definisi diatas dapat ditarik kesimpulan pajak yaitu :

1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pe mbayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran – pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukkannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai *public investment*.

2. Fungsi Pajak

Menurut Jeni Susyanti dan Ahmad Dahlan (2015, 9) dalam bukunya yang berjudul Perpajakan untuk Praktisi dan Akademisi terdapat *The Four R* adalah istilah yang mengacu pada fungsi pajak yang dipungut oleh negara yaitu :

1. *Revenue* (penerimaan)

Fungsi penerimaan (anggaran) adalah fungsi utama dalam pemungutan pajak. Dalam pemerintahan, pajak menunjukkan partisipasinya kepada negara dengan menyumbangkan lebih dari 70% dari total pendapatan negara.

2. *Redistribution* (pemerataan)

Pajak yang dipungut oleh negara akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk penyediaan fasilitas – fasilitas umum (*public*).

3. *Repricing* (pengaturan harga)

Pajak digunakan untuk mengatur atau mencapai tujuan tertentu dibidang ekonomi, politik, social, budaya, pertahanan dan keamanan. Contoh Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang bertujuan untuk membatasi konsumsi masyarakat terhadap barang mewah, termasuk yang dikenakan pada komoditas minuman keras untuk pengurangan konsumsi masyarakat terhadap minuman keras.

4. *Representation* (legalitas pemerintahan)

Slogan revolusioner di Inggris yang menyerukan “*No taxion without representation*”, dan di Amerika Serikat “*Taxion without representation is robbery*” mengimplikasikan bahwa pemerintah membebani pajak atas warga Negara, dan warga Negara meminta akuntabilitas dari pemerintah sebagai bagian dari kesepakatan (pengenaan pajak tidak diputuskan secara sepihak oleh penguasa tetapi merupakan kesepakatan bersama rakyat melalui perwakilannya di parlemen).

3. Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Dwi Sunar Prasetyono (2012, 20–22) dalam bukunya yang berjudul Buku Pintar Pajak agar tidak menimbulkan berbagai masalah, maka pemungutan pajak harus memenuhi persyaratan, diantaranya sebagai berikut :

1. Pemungutan Pajak harus Adil

Seperti halnya produk hukum, pajak pun mempunyai tujuan untuk menciptakan keadilan dalam hal pemungutan pajak, baik dalam perundang – undangan maupun dalam pelaksanaannya.

2. Pengaturan Pajak Harus berdasarkan UU

Sesuai dengan pasal 23 UUD 1945 yang berbunyi :

“Pajak dan pungutan yang bersifat untuk keperluan negara diatur dengan undang – undang “

3. Pemungutan Pajak tidak mengganggu Perekonomian

Pemungutan pajak harus diusahakan sedemikian rupa agar tidak mengganggu kondisi perekonomian, baik kegiatan produksi, perdagangan, maupun jasa.

4. Pemungutan Pajak Harus Efisien

Biaya – biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemungutan pajak harus diperhitungkan.

5. Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana

Sistem yang sederhana akan memudahkan wajib pajak dalam menghitung beban pajak yang harus dibiayai, sehingga dapat memberikan dampak positif bagi para wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dalam pembayaran pajak dan sebaliknya.

4. Jenis dan Penggolongan Pajak

Menurut Mardiasmo (2018, 7-8) dalam bukunya yang berjudul Perpajakan, pemungutan pajak yang terdapat di dalam masyarakat banyak macamnya. Tetapi dengan dasar berbagai segi, pajak dapat dikelompokkan kedalam beberapa jenis, yaitu berdasarkan golongannya, Menurut sifatnya dan Lembaga pemungutannya yaitu :

1. Pembagian Pajak Berdasarkan Golongan

Berdasarkan golongannya, pajak dibedakan menjadi pajak langsung dan pajak tak langsung.

a. Pajak Langsung

Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Penghasilan.

b. Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai

2. Pembagian Pajak Berdasarkan Sifatnya

Dalam hal ini pajak digolongkan menjadi dua golongan, yaitu pajak Subjektif dan pajak Objektif.

a. Pajak Subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh : Pajak Penghasilan

b. Pajak Objektif

Pajak Objektif adalah pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai

3. Pembagian Pajak Berdasarkan Lembaga Pemungutannya

Dalam hal ini pajak dibagi menjadi dua yaitu pajak Pusat dan pajak Daerah sebagai berikut :

- a. Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas barang mewah, dan Bea Materai.

- b. Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah terdiri :

1. Pajak Provinsi, Contoh : Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

5. Tata Cara Pemungutan Pajak

Tata cara pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan tiga bagian Menurut Kasirin (2012, 9) dalam bukunya yang berjudul Perpajakan yaitu :

1. Berdasarkan Stelsel Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan tiga stelsel yaitu :

- a. Stelsel Nyata

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata). Sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui.

b. Stelsel Anggaran

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang – undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak terutang untuk tahun pajak berjalan.

c. Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya.

6. Asas Pemungutan Pajak

Menurut Thomas Sumarsan (2013, 11–12) dalam bukunya yang berjudul Perpajakan Indonesia terdapat beberapa asas yang dapat dipakai oleh negara sebagai asas dalam menentukan wewenangnya untuk mengenakan pajak, khususnya pajak penghasilan. Asas utama yang paling sering digunakan oleh negara sebagai landasan untuk mengenakan pajak adalah :

1. Asas Domisili

Asas Domisili disebut juga asas kewarganegaraan. Berdasarkan asas ini negara akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan, apabila untuk kepentingan perpajakan, orang pribadi tersebut merupakan penduduk atau berdomisili di negara itu atau apabila badan yang bersangkutan berkedudukan di negara itu.

2. Asas Sumber

Negara yang menganut asas sumber akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan hanya apabila penghasilan yang akan dikenakan pajak itu diperoleh atau diterima oleh orang pribadi atau badan yang bersangkutan dari sumber – sumber yang berada di negara itu.

3. Asas Kebangsaan

Asas kebangsaan atau asas kewarganegaraan, dalam asas ini, yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah status kewarganegaraan dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan.

7. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Dwikora Harjo (2013, 27–28) dalam bukunya yang berjudul Perpajakan Indonesia Sebagai Materi Perkuliahan di Perguruan Tinggi. Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi lima, yakni :

1. *Official Assessment System*

Suatu sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menghitung besarnya pajak terhutang oleh seseorang berada pada pemungut atau

aparatur pajak, dalam hal ini wajib pajak bersifat pasif, menunggu ketetapan pajak dari aparatur pajak, hutang baru timbul bila sudah ada surat ketetapan pajak dari aparatur pajak.

2. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menghitung besarnya pajak terutang berada pada wajib pajak. Dalam sistem ini wajib pajak harus aktif menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri pajaknya.

3. *Full Self Assesment System*

Suatu Sistem perpajakan dimana wewenang untuk menghitung besarnya pajak terutang oleh wajib pajak berada pada wajib pajak itu sendiri dalam menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajaknya.

4. *Semi Full Self Assesment System*

Sistem perpajakan yang menggabungkan antara *Self Assessment System* dan *Official Assessment System*.

5. *Withholding System*

Suatu sistem perpajakan dimana pihak ketiga diberikan kepercayaan atau diberdayakan oleh Undang – Undang Perpajakan untuk memotong pajak penghasilan dengan tarif tertentu dari penghasilan yang dibayarkan ke wajib pajak.

8. Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Menurut Jeni Susyanti dan Ahmad Dahlan (2015, 14) dalam bukunya yang berjudul *Perpajakan Untuk Praktisi dan Akademisi Undang-Undang*

No. 28 Tahun 2007 tanggal 17 Juli 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan secara umum mengatur tentang hak dan kewajiban Wajib Pajak maupun fiskus. Dalam pelaksanaannya Undang-Undang tersebut memerlukan peraturan yang lebih teknis (peraturan pelaksanaan). Berikut ini uraian mengenai hak dan kewajiban yang tertuang dalam UU No. 28 Tahun 2007 serta peraturan pelaksanaannya :

1. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)

NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya (Pasal 1 angka 6 UU KUP). Fungsi dari NPWP yaitu :

- a. mengetahui identitas wajib pajak
- b. menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan
- c. keperluan yang berhubungan dengan dokumen perpajakan
- d. mengetahui kewajiban perpajakan, misalnya dalam pengisian SSP
- e. mendapatkan pelayanan dari instansi-intansi tertentu yang mewajibkan mencantuman NPWP dalam dokumen yang diajukan.

2. SPT (Surat Pemberitahuan)

SPT adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek

pajak, atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Cara penyampaian SPT oleh wajib pajak dapat dilakukan:

- a. Secara langsung dan diberikan tanda penerimaan surat
- b. Melalui pos dengan bukti pengiriman surat ; atau
- c. Dengan cara lain, melalui perusahaan jasa ekspedisi/kurir dengan bukti pengiriman surat atau *e-filing* melalui ASP (Penyedia Jasa Aplikasi) dan diberikan Bukti Penerimaan Elektronik.

3. Pembayaran Pajak

Pembayaran pajak terhutang adalah kewajiban yang melekat pada diri setiap wajib pajak yang bertanggung jawab terhadap pembayarannya ke Kas Negara, baik sebagai pemikul beban pajak maupun sebagai pemotong atau pemungut pajak. Kewajiban membayar pajak yang terhutang dinyatakan dalam Pasal 10 ayat (1) UU KUP yang berbunyi :

“Wajib Pajak wajib membayar atau menyeteror pajak yang terhutang dengan menggunakan SSP ke kas negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan PMK”.

9. Hukum Pajak

Menurut Thomas Sumarsan (2013, 10–11) dalam bukunya yang berjudul Perpajakan Indonesia. Hukum Pajak mengatur hubungan antara pemerintah (fiskus) selaku pemungut pajak dengan Wajib Pajak. Hukum Pajak dibedakan menjadi:

1. Hukum Pajak Materiil, memuat norma – norma yang menerangkan keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenakan pajak (objek pajak), siapa yang dikenakan pajak (subjek), berapa besar pajak yang dikenakan, segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak. Sebagai contoh : Undang – undang Pajak Penghasilan.
2. Hukum Pajak Formal, memuat bentuk/tata cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi kenyataan, hukum pajak formal ini memuat, antara lain :
 - a. Tata cara penetapan utang pajak
 - b. Hak – hak fiskus untuk mengawasi Wajib Pajak mengenai keadaan, perbuatan dan peristiwa yang dapat menimbulkan utang pajak.
 - c. Kewajiban Wajib Pajak sebagai contoh penyelenggaraan pembukuan pencatatan, dan hak – hak Wajib Pajak mengajukan keberatan dan banding

10. Kedudukan Hukum Pajak

Menurut Thomas Sumarsan (2013, 6) dalam bukunya yang berjudul Perpajakan Indonesia. Di Negara – negara hukum segala sesuatu harus ditetapkan dalam undang – undang Seperti Indonesia pemungutan pajak diatur dalam pasal 23 ayat (2) Undang – Undang Dasar 1945 yang berbunyi :

“Pajak dan pungutan yang bersifat untuk keperluan negara diatur dengan Undang – undang”

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan UU tentang pajak, yaitu :

- a. Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara yang berdasarkan UU tersebut harus dijamin kelancarannya.
- b. Jaminan hukum bagi para wajib pajak untuk tidak diperlakukan secara umum.
- c. Jaminan hukum akan terjaganya kerahasiaan bagi para wajib pajak.

11. Hambatan Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016, 8) dalam bukunya yang berjudul perpajakan, hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi :

1. Perlawanan Pasif

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak yang dapat disebabkan oleh :

- a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
- b. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami oleh masyarakat.
- c. Sistem control tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

2. Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang dilakukan oleh wajib pajak dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuknya antara lain :

- a. *Tax Avoidance*, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.

- b. *Tax Evasion*, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang -undang (menggelapkan pajak).

12. Objek Pajak

Menurut Eddy Supriyanto (2011, 69) dalam bukunya yang berjudul Akuntansi Perpajakan. Berikut ini adalah beberapa penghasilan yang dikenai pajak bersifat Final adalah sebagai berikut:

- a. penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
- b. penghasilan berupa hadiah undian;
- c. penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
- d. penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan
- e. penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

13. Pengertian Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Eddy Supriyanto (2011, 37-38) dalam bukunya yang berjudul Akuntansi Perpajakan. Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah

Pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri wajib dilakukan oleh pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai.

Akuntansi PPh Pasal 21 adalah proses pencatatan transaksi kaitannya dengan PPh Pasal 21 misalnya pembayaran gaji, upah dan lain sebagainya. Ketika ada transaksi kaitannya dengan pemotongan/pemungutan PPh Pasal pembayaran PPh Pasal 21 dan juga pembayaran gaji/upah karyawan maka perlu ada pencatatan akuntansi yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

14. Perhitungan Umum Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Eddy Supriyanto (2011, 38) dalam bukunya yang berjudul Akuntansi Perpajakan. Berikut perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21 :

1. Biaya Jabatan

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-250/PMK. 03/2008, besarnya biaya jabatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk penghitungan pemotongan Pajak Penghasilan bagi pegawai tetap ditetapkan sebesar 5% dari Penghasilan Bruto, setinggi-tingginya Rp 6.000.000,00 setahun atau Rp 500.000,00 sebulan. Sedangkan besarnya biaya pensiun sebagai pengurang penghasilan bruto adalah sebesar Rp 2.400.000,- setahun atau Rp 200.000,- sebulan.

2. Penghasilan Tidak Kena Pajak

Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak adalah bagi:

- a. Wajib Pajak: Rp 15.840.000,-
- b. Tambahan status kawin: Rp 1.320.000,-
- c. Istri Bekerja: Rp 15.840.000,-
- d. Tambahan tanggungan: Rp 1.320.000,- (Maksimal 3)

3. Tarif Pasal 21

Penghasilan s.d Rp 50.000.000, tarif 5%

- a. Penghasilan s.d Rp 50.000.000 s.d. Rp 250.000.000, tarif 15%
- b. Penghasilan Rp 250.000.000 s.d. Rp 500.000.000, tarif 25%
- c. Penghasilan di atas Rp 500.000.000, tarif 30%

15. Teori Atribusi (*Attribution Theory*)

Dalam penelitian Sarasdiyanto (2017) Menurut Tyas (2013) Teori Hubungan (*attribution theory*) telah dikemukakan untuk mengembangkan penjelasan tentang cara-cara bagaimana menilai individu secara berbeda, bergantung pada arti yang dihubungkan dengan perilaku tertentu. Pada dasarnya, teori ini mengemukakan bahwa ketika mengobservasi perilaku seorang individu, peneliti berupaya untuk menentukan apakah perilaku tersebut disebabkan secara internal atau eksternal. Menurut Santi (2012) dalam penelitian Sarasdiyanto (2017) menjelaskan teori atribusi sangat relevan untuk menerangkan kondisi internal maupun eksternal wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Seseorang taat membayar pajak dilihat dari kondisi internal maupun eksternalnya, begitu pula

sebaliknya. Dalam hal ini, teori atribusi relevan dengan kepatuhan wajib pajak. Karena kesediaan wajib pajak untuk melakukan kewajibannya dipengaruhi oleh perilaku dari wajib pajak itu sendiri. Selain itu, juga bisa dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal dari lingkungan wajib pajak tersebut. Faktor internal bisa berupa usia, gender, status, pekerjaan kesadaran wajib pajak, dan lain-lain. Sedangkan untuk faktor eksternal berupa SPPT, pelayanan, sanksi dan sosialisasi pemerintah.

16. Teori Perilaku Yang Direncanakan (*Theory of Planned Behaviour*)

Dalam Penelitian Sarasdiyanto (2017) Menurut Ajzen (1991) “*Theory of Planned Behavior*” (TPB) menjelaskan bahwa perilaku yang ditentukan oleh individu timbul karena ada minat untuk berperilaku. *Theory of Planned Behavior* relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kesadaran wajib pajak dapat menjadi faktor yang menentukan perilaku patuh formal pajak. Setelah wajib pajak memiliki kesadaran untuk membayar pajak, maka wajib pajak akan memiliki niat untuk membayar pajak dan kemudian merealisasikan niat tersebut.

B. Variabel – Variabel Penelitian

Menurut Sugiyono (2017, 66) dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Variabel Penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek, organisasi atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Variabel-variabel dalam penelitian ini meliputi jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan dan kesadaran membayar pajak serta kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

1. Demografi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Demografi yaitu :

1. Ilmu tentang susunan, jumlah, dan perkembangan penduduk ; ilmu yang memberikan uraian atau gambaran statistik mengenai suatu bangsa dilihat dari sudut sosial politik ; ilmu kependudukan.
2. penyelidikan tentang berbagai kelompok pemakai bahasa dan variasi bahasa dalam suatu masyarakat bahasa dengan mempergunakan statistik, dan penggolongannya berdasarkan faktor kelas sosial, agama, usia, tempat, pendidikan, dan sebagainya.

a. Jenis Kelamin

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia jenis kelamin dapat iartikan sebagai berikut :

1. Jodoh (laki-laki dan perempuan atau jantan dan betina)
2. Sifat jasmani atau rohani yang membedakan dua makhluk sebagai betina dan jantan atau wanita dan pria
3. Jenis laki-laki atau perempuan

4. Alat pada tubuh manusia, binatang, dan sebagainya untuk mengadakan keturunan.

Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pengertian *Gender* dibagi menjadi beberapa bagian yaitu :

1. *Gender* adalah hubungan sosial antara laki – laki dan perempuan. *Gender* merujuk pada hubungan antara laki – laki dan perempuan, anak laki – laki dan anak perempuan, dan bagaimana hubungan sosial ini dikonstruksikan. Peran *gender* bersifat dinamis dan berubah antar waktu.
2. Kesetaraan *gender* adalah hasil dari ketiadaan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin atas dasar kesempatan, alokasi sumber daya atau manfaat dan akses terhadap pelayanan.
3. Pengarus utamaan *gender* adalah proses untuk menjamin perempuan dan laki – laki mempunyai akses dan control terhadap sumber daya, memperoleh manfaat pembangunan dan pengambilan keputusan yang sama disemua tahapan proses pembangunan dan seluruh proyek program dan kebijakan pemerintah.
4. Kesadaran *gender* adalah suatu pengertian bahwa ada faktor – faktor sosial yang menentukan antara laki – laki dan perempuan atas dasar tingkah laku, yang mempengaruhi kemampuan mereka untuk mengakses dan mengontrol sumber daya. Kesadaran ini membutuhkan penerapan melalui Analisa *gender* menjadi proyek, program dan kegiatan.

5. Analisa *gender* adalah metodologi untuk pengumpulan dan pengolahan informasi tentang *gender*. Analisa *gender* membutuhkan data terpilih berdasarkan jenis kelamin dan suatu pengertian dari konstruksi sosial dari peran *gender*, bagaimana pembagian kerja dan dinilai. Analisa *gender* adalah proses dari Analisa informasi agar supaya menjamin manfaat dan sumber daya pembangunan secara efektif dan adil ditujukan baik bagi laki – laki maupun perempuan.
6. Perencanaan *gender* (atau Perencanaan yang sensitif *gender*) adalah proses dari perencanaan program – program dan proyek – proyek pembangunan yang sensitif *gender* dan dimana mempertimbangkan impact dari peran *gender* dan kebutuhan *gender* dari laki – laki dan perempuan di dalam sasaran masyarakat atau sector.
7. Peran *gender* adalah perilaku yang dipelajari di dalam suatu masyarakat/komunitas yang dikondisikan bahwa kegiatan, tugas – tugas atau tanggung jawab patut diterima baik oleh laki – laki maupun perempuan. Peran *gender* dapat berubah, dan dipengaruhi oleh usia, kelas, ras, etnik, agama dan lingkungan geografi, ekonomi dan politik. Baik perempuan dan laki – laki memiliki peran ganda di dalam masyarakat. Perempuan kerap mempunyai peran dalam mengatur reproduksi, produksi dan kemasyarakatan. Laki – laki lebih terfokus pada produksi dan politik kemasyarakatan.

b. Usia

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Usia memiliki beberapa pengertian yaitu :

1. Formatif, usia yang kritis (usia antara 17 – 25 tahun) bagi pembentukan sikap dan pandangan politik seseorang.
2. Harapan hidup, usia seseorang yang diharapkan hidup berdasarkan perhitungan statistik.
3. Kawin, usia yang dianggap cocok secara fisik dan mental untuk kawin (kira – kira usia sekitar 20 tahun keatas).
4. Kehamilah, taksiran usia janin yang dihitung dari hari pertama masa haid normal.
5. Lanjut, tahap masa tua dalam perkembangan individu (usia 60 tahun ke atas).
6. Muda, tahap dalam perkembangan individu, pada waktu seseorang sedang muda tumbuh dan berkembang (sangat potensial).
7. Produktif, usia ketika seseorang masih mampu bekerja dan menghasilkan sesuatu.
8. Reproduksi, masa di antara pubertas dan menopause yang pembuahannya sering kali jadi (positif).
9. Sekolah, usia yang dianggap cocok bagi anak secara fisik dan mental untuk masuk sekolah.
10. Senja, usia 50 tahun ke atas.

c. Tingkat Pendidikan

Dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS, yakni :

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”.

Pendidikan dapat didefinisikan sebagai suatu proses dimana masyarakat bisa belajar bertanggung jawab dan meningkatkan kualitas hidup dengan kata lain merupakan suatu proses belajar terus menerus dan tidak ada kata puas, dengan Pendidikan bisa meningkatkan prestasi dan kreatifitas, penelitian yang dilakukan. Pengaruh pendidikan bisa menguntungkan atau tidak menguntungkan. Orang berpendidikan akan lebih memahami peluang untuk melakukan penggelapan pajak sehingga dapat memengaruhi perilaku kepatuhan perpajakan mereka, jadi tergantung bagaimana orang itu mempergunakan pengetahuan yang ia dapat dalam pendidikan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Pasaribu, Tjen , 2016). Sedangkan dalam penelitian Anthony (2018) pendidikan bukan hal yang berdampak besar dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dari hal diatas kita dapat tarik kesimpulan bahwa orang yang berpendidikan masih kurang patuh akan pajak.

Menurut UU SISDIKNAS No. 20 tahun 2003, indikator tingkat Pendidikan terdiri dari jenjang pendidikan dan kesesuaian jurusan. Jenjang pendidikan adalah tahapan Pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan, terdiri dari:

1. Pendidikan dasar : Jenjang Pendidikan awal selama 9 tahun, tahun pertama masa sekolah anak – anak yang melandasi jenjang Pendidikan menengah.
2. Pendidikan menengah : Jenjang Pendidikan lanjutan Pendidikan dasar.
3. Pendidikan tinggi : Jenjang Pendidikan setelah Pendidikan menengah yang mencakup program sarjana, magister, doktor, dan spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.

2. Kesadaran Membayar Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Kesadaran memiliki arti yaitu :

1. Keinsafan ; keadaan mengerti
2. Kesadaran seseorang akan pengetahuan bahwa suatu perilaku tertentu diatur oleh hukum.

Sedangkan Menurut Direktorat Jenderal Pajak, Kesadaran merupakan unsur dalam manusia untuk memahami realitas dan bagaimana cara bertindak atau menyikapi terhadap realitas. Terdapat tiga bentuk kesadaran utama terkait pembayaran pajak :

1. Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. Pajak disadari digunakan untuk pembangunan negara guna meningkatkan kesejahteraan warga negara.
2. Kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara.wajib pajak mau membayar pajak

karena memahami penundaan membayar pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada pengurangan sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara.

3. Kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang – undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar karena pembayaran didasari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara.

3. Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kepatuhan memiliki empat pengertian yaitu :

1. Patuh yaitu, suka menurut (perintah dan sebagainya) ; taat (pada perintah, aturan, dan sebagainya) ; berdisiplin.
2. Mematuhi yaitu, atuh kepada ; menuruti; menaati.
3. Pematuhan yaitu, proses, cara, perbuatan mematuhi.
4. Kepatuhan yaitu, sifat patuh ; ketaatan.

Sedangkan Menurut Dwikora Harjo (2013, 67) dalam bukunya yang berjudul Perpajakan Indonesia Sebagai Materi Perkuliahan di Perguruan Tinggi. Kepatuhan Pperpajakan adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

1. Kepatuhan Formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam

perundang – undangan perpajakan. Contoh : menyampaikan SPT tepat waktu.

2. Kepatuhan Material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantive (pada hakekatnya) memenuhi semua ketentuan material perpajakan sesuai dengan isi dan jiwa perundang – undang perpajakan. Contoh : mengisi SPT dengan baik.

Indikator kepatuhan wajib pajak menurut Dwikora Harjo (2013, 68-69

) adalah sebagai berikut:

1. Kepatuhan untuk mendaftarkan diri.

Wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif wajib mendaftarkan diri pada KPP yang wilayah kerjanya terdiri dari tempat tinggal dan tempat kegiatan usaha Wajib Pajak untuk kemudian mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). NPWP23 digunakan sebagai identitas bagi Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya.

2. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang.

Pajak yang telah dihitung kemudian disetorkan ke kas negara melalui bank atau kantor pos dengan menggunakan formulir Surat Setoran Pajak (SSP).

3. Tunggakan pajak merupakan pajak terutang yang belum dilunasi oleh Wajib Pajak setelah jatuh tempo tanggal pengenaan denda.
4. Wajib Pajak diwajibkan untuk mengisi dan menyampaikan SPT kepada KPP dengan batas waktu penyampaian untuk SPT Masa paling lambat

20 hari setelah akhir masa pajak, sedangkan untuk SPT Tahunan paling lambat 3 bulan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan 4 bulan untuk Wajib Pajak Badan setelah akhir tahun pajak. Wajib pajak akan dikenakan sanksi administrasi apabila terlambat atau tidak menyampaikan SPT.

C. Peneliti Terdahulu

Penelitian tentang faktor – faktor demografi terhadap kepatuhan wajib pajak sudah dilakukan oleh beberapa peneliti. Tabel dibawah ini merupakan ringkasan dari penelitian terdahulu antara lain:

Tabel II.1

Hasil Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Philip Suryajaya (2015)	Pengaruh Norma Sosial dan Faktor-faktor Demografi Terhadap kepatuhan Wajib Pajak (Studi kasus para Pendeta di Semarang)	1. Independen: a. Norma Deskriptif b. Norma Injungtif c. Norma Subjektif d. Norma	1. Norma Deskriptif berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pajak 2. Norma Injungtif, Norma Subjektif, dan Norma

			Personal e. <i>Gender</i> f. Usia g. Tingkat Pendidikan	Personal. Ketiga norma ini berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pajak secara signifikan.
			2. <i>Dependen</i> : a. Kepatuhan Wajib Pajak	3. <i>Gender</i> dan Usia menurut parameter pertama, memiliki pengaruh negatif dan juga tidak signifikan.
				4. Berbanding terbalik dengan hasil dari parameter kedua, yaitu memiliki pengaruh positif

				<p>terhadap</p> <p>Kepatuhan Pajak</p> <p>Pribadi namun</p> <p>tetap tidak</p> <p>signifikan.</p> <p>5. Tingkat</p> <p>Pendidikan</p> <p>berpengaruh</p> <p>signifikan</p> <p>terhadap</p> <p>Kepatuhan Pajak</p>
2.	<p>Muslimah</p> <p>Mahmuda</p> <p>h (2017)</p>	<p>Analisis Dampak</p> <p><i>Tax Morale</i></p> <p>Terhadap Kepatuhan</p> <p>Pajak UMKM di</p> <p>Kota Semarang</p>	<p>1. Independen:</p> <p>a. Kebahagiaan</p> <p>b. Religiusitas</p> <p>c. Lingkungan</p> <p>d. Kelembagaan</p> <p>e. Etika</p> <p>2. Kontrol :</p> <p>a. Jenis Kelamin</p>	<p>1. Variabel</p> <p>Lingkungan,</p> <p>Kelembagaan,</p> <p>Etika, Lama</p> <p>Usaha, dan</p> <p>Ukuran Usaha</p> <p>berpengaruh</p> <p>secara signifikan</p> <p>terhadap</p> <p>Kepatuhan Pajak</p>

			b. Usia c. Pendidikan d. Status Perkawinan e. Lama Usaha f. Ukuran Usaha 3. Dependen : a. Kepatuhan Pajak UMKM.	UMKM di Kota Semarang. 2. Variabel yang tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pajak di Kota Semarang yakni variabel Kebahagiaan, Religiusitas, Jenis Kelamin, Usia, Pendidikan, dan Status Perkawinan
3.	Erica Kakunsi, Sifrid Pangemanan, Wiston	Pengaruh <i>Gender</i> dan Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Wilayah	1. Independen : a. <i>Gender</i> b. Tingkat Pendidikan	1. Tidak berpengaruh signifikan <i>Gender</i> pada Kepatuhan Wajib

	Pontoh (2017)	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tahunan	2. Dependen : a. Kepatuhan Wajib Pajak	Pajak Orang Pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Tahunan 2. ada berpengaruh signifikan Tingkat Pendidikan pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Tahunan 3. Tidak terdapat interaksi antar <i>gender</i> dan tingkat pendidikan dalam memengaruhi
--	-----------------	--	---	--

				<p>Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Tahunan</p>
4.	<p>Ganda Frisno Pasaribu dan Christine Tjen (2016)</p>	<p>Pengaruh Faktor- Faktor Demografi Terhadap Kepatuhan Perpajakan di Indonesia</p>	<p>1. Independen : a. Gender b. Status Pernikahan c. Tingkat Pendidikan d. Jenis Pekerjaan e. Tingkat Penghasilan</p> <p>2. Dependen : a. Kepatuhan</p>	<p>1. Bahwa Responden Laki- laki dan Perempuan mempunyai Kepatuhan Perpajakan yang sama.</p> <p>2. Bahwa tidak ada perbedaan Kepatuhan Perpajakan antara Responden yang Sudah Menikah</p>

			Wajib Pajak	<p>dengan yang Belum Menikah.</p> <p>3. Tingkat Pendidikan, Jenis Pekerjaan dan Tingkat Penghasilan, berkorelasi secara signifikan terhadap Kepatuhan Perpajakan</p>
5.	Brian Anthony (2018)	Pengaruh Faktor- Faktor Demografi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Surabaya	<p>1. Independen :</p> <p>a. Jenis Kelamin</p> <p>b. Usia</p> <p>c. Tingkat Pendidikan</p> <p>d. Status Perkawinan</p>	<p>1. Variabel Jenis Kelamin berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak</p> <p>2. Variabel Usia, Tingkat</p>

			<p>2. Dependen :</p> <p>a. Kepatuhan Wajib Pajak</p>	<p>Pendidikan dan Status Perkawinan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.</p>
6.	Ridho Sarasdiyanto (2017)	<p>Pengaruh Faktor – faktor Demografi dan Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi kasus wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Purworejo)</p>	<p>1. Independen :</p> <p>a. Umur</p> <p>b. Jenis Kelamin</p> <p>c. Tingkat Pendidikan</p> <p>d. Status Pernikahan</p> <p>e. Kesadaran Wajib Pajak</p> <p>2. Dependen :</p> <p>a. Kepatuhan</p>	<p>1. Umur Wajib Pajak Orang Pribadi berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di daerah Purworejo</p> <p>2. Jenis kelamin Wajib Pajak Orang Pribadi berpengaruh</p>

			Wajib Pajak Orang Pribadi	<p>signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di daerah Purworejo</p> <p>3. Tingkat Pendidikan Wajib Pajak Orang Pribadi berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di daerah Purworejo.</p> <p>4. Status Pernikahan Wajib Pajak Orang Pribadi tidak berpengaruh</p>
--	--	--	------------------------------	--

				<p>signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di daerah Purworejo</p> <p>5. Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di daerah Purworejo.</p>
7.	Siti Nurlaela (2014)	<p>Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman, Kesadaran, Persepsi terhadap Kemauan Membayar Pajak Orang Pribadi Yang</p>	<p>1. Independen : a. Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan</p>	<p>1. Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap</p>

		Melakukan Pekerjaan Bebas	<p>b. Kesadaran</p> <p>c. Persepsi</p> <p>2. Dependen :</p> <p>a. Kemauan Membayar Pajak Orang Pribadi</p>	<p>Kemauan Membayar Pajak</p> <p>2. Persepsi yang baik terhadap sistem Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kemauan Membayar Pajak oleh Wajib Pajak</p>
8.	Miftah Muflih (2017)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Medan Kota	<p>1. Independen :</p> <p>a. Kesadaran Wajib Pajak</p> <p>b. Sanksi Perpajakan</p> <p>2. Dependen :</p>	<p>1. Secara simultan Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Penyuluhan Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan</p>

			<p>a. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi</p>	<p>berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Medan Kota.</p> <p>2. Secara parsial variabel pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Medan Kota.</p> <p>3. Kualitas Pelayanan Fiskus</p>
--	--	--	---	---

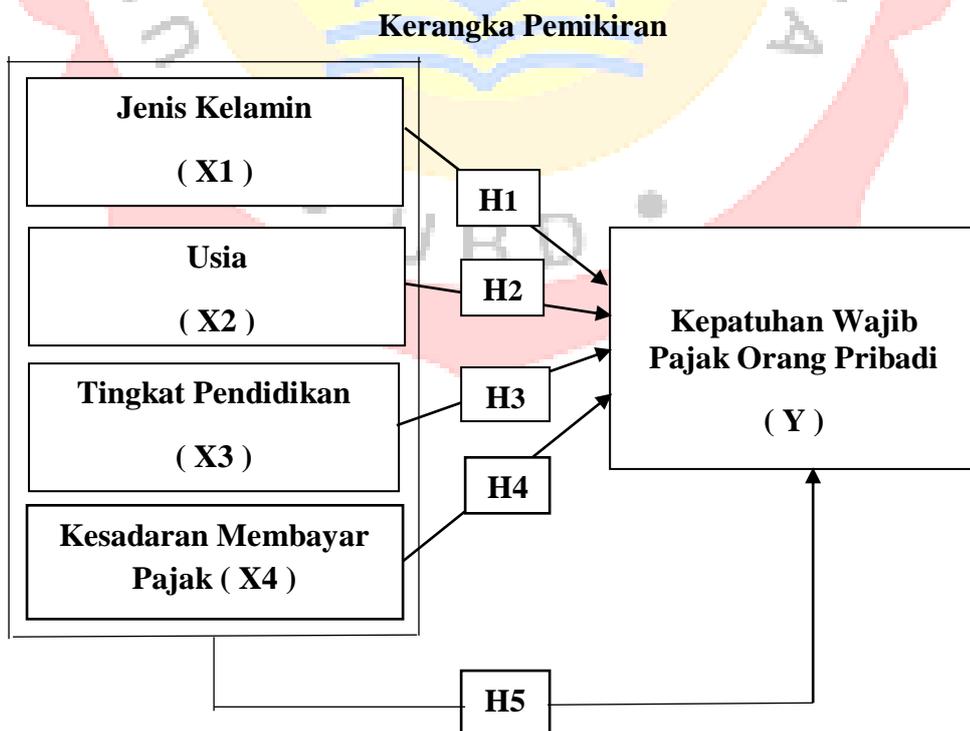
				<p>dan Penyuluhan</p> <p>Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Medan Kota.</p>
9.	<p>Maria Angelina Sutiono dan Yenni Mangoting (2014)</p>	<p>Pengaruh Pandangan Sosial,Usia, dan Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Praktik Penggelapan Pajak di Surabaya</p>	<p>1.Independen :</p> <p>a. Pandangan Sosial</p> <p>b. Usia</p> <p>c. Kepercayaan kepada Pemerintah</p> <p>2 .Dependen :</p> <p>a. Praktik Penggelapan Pajak</p>	<p>1. ketiga variabel tersebut secara simultan dan parsial berpengaruh signifikan terhadap Praktik penggelapan pajak di Surabaya.</p>

Sumber : Data Diolah Penulis (2018)

Berdasarkan data diatas, terdapat perbedaan yang terdapat dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu objek penelitian yang dilakukan di PT. Indah Putih Cemerlang Wilayah Tangerang serta tahun yang digunakan oleh penulis yaitu dalam lima tahun terakhir dari tahun 2013 – 2017.

D. Kerangka Pemikiran

Menurut Sudaryono (2017, 158) dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian. Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka pemikiran teoritis dalam penelitian ini adalah tentang jenis kelamin, usia, tingkat Pendidikan dan kesadaran membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.



Gambar II.1

E. Hipotesis Penelitian

Menurut Nyoman Dantes (2012, 164) dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian. Hipotesis adalah praduga ataupun asumsi yang harus diuji melalui data atau fakta yang diperoleh melalui penelitian. Dengan demikian, hipotesis merupakan penuntun bagi peneliti dalam menggali data yang diinginkan.

1. Hubungan Jenis Kelamin Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Variabel jenis kelamin seringkali digunakan dalam penelitian perpajakan. Studi-studi yang telah dilakukan menunjukkan hasil yang tidak konsisten. (Pasaribu dan Tjen (2016). *Gender* adalah konsep yang memandang pria dan wanita bukan hanya sebagai perbedaan biologis. *Gender* memiliki aspek yang lebih luas, seperti sosial, budaya dan perilaku (Anthony (2018), *Centre for Tax Policy and Administration* (2004) mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi diantaranya faktor individual seperti *gender* dalam penelitian (Kankusi, Pangeman, Pontoh (2017). Penelitian jenis kelamin telah banyak dilakukan dan beberapa hasil dari penelitian sebelumnya, Menurut Suryajaya (2015) jenis kelamin berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi hal yang sama diungkapkan oleh penelitian dari Pasaribu dan Tjen (2016), Anthony (

2018) dan Sarasdiyanto (2017), Menurut Pasaribu dan Tjen (2016) terdapat kecenderungan bahwa perempuan lebih jujur dan patuh dibandingkan laki-laki. Penelitian terdahulu mengenai kepatuhan pajak juga menemukan bahwa laki-laki kurang patuh terhadap peraturan perpajakan jika dibandingkan dengan perempuan (Tittle, 1980) sedangkan hasil bertolak belakang diungkapkan dalam penelitian Mahmudah (2017) dan Kankusi, Pangeman dan Pontoh (2017) dimana hasil penelitiannya jenis kelamin tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Berdasarkan uraian diatas, maka diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut

H₁ : Jenis Kelamin Berpengaruh Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

2. Hubungan Usia Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Parameter usia juga menarik untuk diteliti, data Badan Statistik Indonesia menunjukkan bahwa dalam dua puluh lima tahun yang akan datang, jumlah penduduk indonesia usia produktif akan bertambah. Hal ini membuat usia menjadi salah satu faktor yang menarik untuk diteliti (Sutyono dan Mangoting (2014). Usia pun memiliki pengaruh akan kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi, wajib pajak yang lebih muda, dinilai lebih berani mengambil resiko, kurang sensitif terhadap hukuman, dan reflek sosial dan perbedaan psikologi berhubungan dengan periode dimana mereka mendapat peringkat tertinggi perbedaan generasi (

Suryajaya, 2015) hal yang sama juga terdapat dalam hasil penelitian Sarasdiyanto (2017) umur wajib pajak orang pribadi yang sudah tua lebih patuh dibandingkan dengan umur wajib pajak orang pribadi yang mempunyai umur lebih muda. Dan hal ini didukung oleh penelitian Sutiono dan Mangoting (2014) bahwa umur berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan hasil berbeda di tunjukan oleh penelitian Anthony (2018) dan Mahmudah (2017) mengungkapkan bahwa usia tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Berdasarkan uraian diatas, maka diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₂ : Usia Berpengaruh Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

3. Hubungan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Pendidikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008) yaitu proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Menurut Suryajaya (2015) tingkat pendidikan yang berbeda – beda yang dimiliki oleh wajib pajak, akan membuat keputusan yang berbeda – beda terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Pasaribu dan Tjen (2015) menyebutkan ada perbedaan signifikan kepatuhan perpajakan antara wajib pajak yang tingkat pendidikannya berbeda, dalam penelitian ini mengatakan bahwa wajib pajak yang tingkat pendidikan tinggi cenderung

melakukan penghindaran pajak. Hal yang sama dihasilkan dari penelitian Sarasdiyanto (2017) wajib pajak orang pribadi yang mempunyai latar belakang tingkat pendidikan tinggi lebih patuh dibandingkan dengan wajib pajak yang memiliki latar belakang pendidikan rendah. Hasil yang sama juga didukung penelitian Suryajaya (2015) dan Kankusi, Pangemanan dan Pontoh (2017) sedangkan hasil yang berbeda ditunjukkan dalam penelitian Anthony (2018) dan Mahmudah (2017) yang menyatakan bahwa tingkat pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Berdasarkan uraian diatas, maka diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₃ : Tingkat Pendidikan Berpengaruh Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

4. Hubungan Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Dalam Penelitian Muflih (2017) Menurut Jatmiko (2006 : 32) menjelaskan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran membayar pajak orang pribadi. Maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Kesadaran membayar pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Maka dapat disimpulkan, kesadaran membayar pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini didukung

penelitian Sarasdiyanto (2017) yang hasilnya kesadaran membayar pajak orang pribadi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di daerah Purworejo. Semakin tinggi tingkat kesadaran membayar pajak maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan Menurut Nurlaela (2014) kesadaran akan pentingnya membayar pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak oleh wajib pajak orang pribadi..

Berdasarkan uraian diatas, maka diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₄ : Kesadaran Membayar Pajak Berpengaruh Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

5. Hubungan Jenis Kelamin, Usia, Tingkat Pendidikan dan Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Dalam Penelitian Pasaribu dan Tjen (2016) berdasarkan review yang dilakukan oleh Jackson and Miliron (1986) atas hasil penelitian di bidang kepatuhan perpajakan dari tahun 1974 sampai dengan tahun 1985, disimpulkan ada 14 variabel yang mempengaruhi perilaku kepatuhan perpajakan, yakni usia, jenis kelamin, pendidikan, tingkat penghasilan, sumber penghasilan, jenis pekerjaan, pengaruh pasangan/keluarga, etika, keadilan, kompleksitas, hubungan dengan otoritas pajak, sanksi, kemungkinan di audit, dan tarif pajak. Dari empat belas variabel tersebut terlihat bahwa faktor – faktor demografi merupakan faktor penentu dalam pembentukan perilaku kepatuhan perpajakan. Dan adapula menurut

Nurlaelah (2014) kesadaran faktor yang paling mendasar dalam kepatuhan wajib pajak karena kesadaran merupakan unsur dalam manusia untuk memahami realitas dan bagaimana cara bertindak atau menyikapi terhadap realitas. Banyak penelitian tentang faktor demografi dan kesadaran pajak yang sudah dilakukan. Adapula hasil peneliti terdahulu Sarasdiyanto (2017) jenis kelamin dan pendidikan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan usia berpengaruh signifikan menurut hasil penelitian Sutiono dan Mangoting (2014) dan kesadaran membayar pajak juga berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi menurut hasil penelitian Muflih (2017).

Berdasarkan uraian diatas, maka diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₅ : Jenis Kelamin, Usia, Tingkat Pendidikan dan Kesadaran Membayar Pajak Berpengaruh Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Gambaran Umum Perusahaan

1. Sejarah Perusahaan

PT. Indah Putih Cemerlang merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang manufaktur botol plastik khusus P.E.T. (*Polyethylene Terephthalate*) PT. Indah Putih Cemerlang adalah salah satu pemimpin dari ahli dan produsen plastik *Polyethylene terephthalate* (PET) di pasar indonesia dan asia tenggara didirikan pada tahun 2005 oleh Bapak Ir. Hartono Dermawan berserta Ibu Ir. Ritha Lusuandi, sejak didirikan pada tahun 2005, kami telah secara konsisten mengirimkan produk berkualitas tinggi dengan waktu penyelesaian yang cepat kepada pelanggan kami. PT. Indah Putih Cemerlang beralamat di Jl. Husein Sastra Negara Komplek Nusa Indah Blok A89 Jurumudi, Tangerang, Nomor Telp (021)54375485, fax (021)54375489, Email : ipcpet89@gmail.com, website : www.indahputihcemerlang.com

PT. Indah Putih Cemerlang berupaya terus berkembang sesuai kebutuhan jaman didukung dengan sumber daya manusia yang

berpengalaman, mesin yang handal serta penggunaan bahan baku dengan kualitas tinggi. Produk PT. Indah Putih Cemerlang meliputi botol obat, botol kapsul, kapsul bulat, botol kosmetik, botol mineral, botol handsoap, botol selai, botol bumbu, toples kue, tutup botol dan galon air berbagai macam ukuran. Kami juga menerima pesanan botol untuk kemasan khusus

2. Visi dan Misi PT. Indah Putih Cemerlang

1. Visi : Kami berusaha untuk menjadi pemimpin dan produsen plastik PET terkemuka di Indonesia dan Asia Tenggara..
2. Misi : Kami bertujuan untuk memenuhi dan melampaui permintaan pelanggan kami dengan nilai luar biasa yang kami tawarkan melalui produk kami yang berkualitas tinggi, pengalaman pelanggan yang unggul, dan pengiriman yang dipercepat.

3. Arti dan Makna Logo

Logo PT. Indah Putih Cemerlang



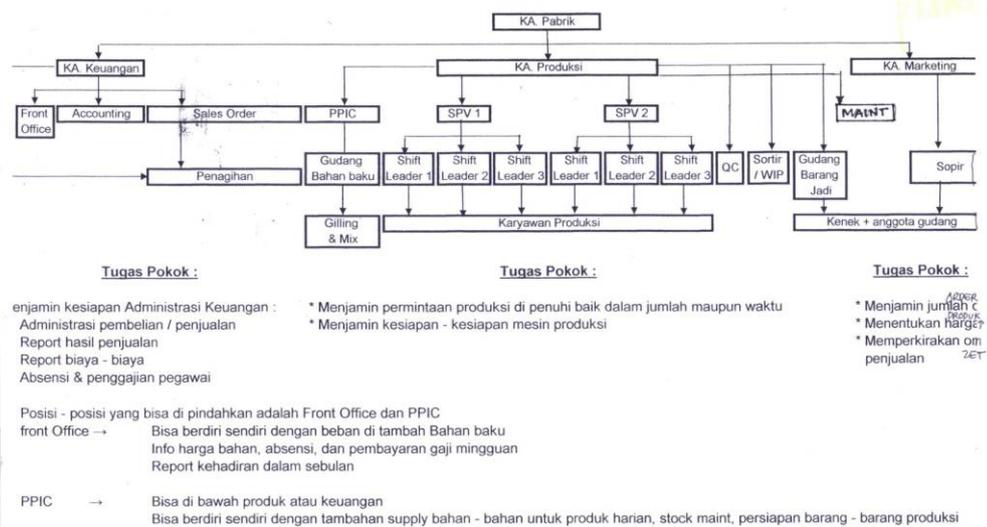
The logo consists of the letters 'IPC' in a bold, green, sans-serif font. A horizontal line is positioned directly below the letters.

PT Indah Putih Cemerlang

P.E.T Plastic Expert and Premium Manufacturer

Gambar III.1

1. Huruf IPC menggambarkan singkatan dari PT. Indah Putih Cemerlang
2. Warna Hijau melambangkan perusahaan mengutamakan kelestarian alam



dan lingkungan, dan melambangkan pertumbuhan serta perusahaan ingin menjaga kehidupan alam.

3. Garis Lurus melambangkan bahwa bisnis perusahaan berjalan lurus dan lancar sampai mencapai tujuan.

4. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi PT.Indah Putih Cemerlang

Gambar III.2

B. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan permasalahan yang diteliti. Menurut Sugiyono (2012, 15) dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, objek penelitian adalah suatu atribut dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Objek penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdapat di PT. Indah Putih Cemerlang Wilayah Tangerang.. wajib pajak yang diteliti adalah wajib pajak yang sudah memiliki NPWP.

C. Metode Penelitian

Menurut (Sugiyono 2017, 9) dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, mendefinisikan metode penelitian sebagai berikut:

“Metode Penelitian Bisnis dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, reliabel dan obyektif dengan tujuan untuk menggambarkan, membuktikan, mengembangkan, menemukan dan menciptakan ilmu, produk dan tindakan baru sehingga dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, mengantisipasi masalah, dan membuat kemajuan dalam bidang bisnis”

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan metode asosiatif dengan pendekatan kuantitatif. Menurut (Sugiyono 2017, 19) dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D memberikan pengertian mengenai metode deskriptif sebagai berikut :

“Metode Deskriptif adalah penelitian yang bermaksud menggambarkan keadaan atau nilai satu atau lebih variabel secara mandiri”.

Dan metode asosiatif menurut (Sugiyono 2017, 20) dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D adalah:

“Penelitian asosiatif adalah penelitian yang bermaksud menggambarkan dan menguji hubungan dua variabel”.

Dalam menguji hipotesis, penulis melakukan penelitian atas dasar kuesioner dengan menggunakan perhitungan persentase, data yang berupa jawaban – jawaban atas kuesioner itulah dijadikan dasar bagi penulis menarik kesimpulan.

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kuantitatif. Menurut Edi Riadi (2014, 48) dalam bukunya yang berjudul Metode Statistik Parametrik & Nonparametrik. Data Kuantitatif adalah data berupa angka hasil dari suatu pengukuran, observasi, dan membilang yang dapat dianalisis menggunakan metode statistik, untuk memperoleh kecenderungan, prediksi hubungan antarvariable, komparasi hasil dengan perbandingan kelompok, sehingga dapat ditampilkan dalam bentuk data – data statistik. Data kuantitatif dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu pertama data diskrit yang terdiri dari data nominal dan ordinal, dan kedua data kontinyu yang terdiri dari data interval dan rasio.

Menurut Nyoman Dantes (2012, 166) dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian, Variabel penelitian adalah suatu totalitas gejala atau objek pengamatan yang akan diteliti. Menurut Husein Umar (2013, 38) dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis

Bisnis. Penelitian kuantitatif berdasarkan pada data yang dapat dihitung untuk menghasilkan penaksiran kuantitatif yang kokoh.

Penelitian ini menggunakan Data Primer dimana Menurut Husein Umar (2013, 42) dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis. Data Primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti. Data penelitian ini diambil dari kuesioner yang disebar di PT. Indah Putih Cemerlang Wilayah Tangerang. Dalam hal ini penulis mengumpulkan data langsung dari para responden.

Penelitian ini menggunakan kuesioner dalam mengumpulkan data Alasan peneliti menggunakan kuesioner (angket) adalah untuk mendapatkan data yang akurat yang langsung berasal dari sumbernya tanpa adanya perantara. Menurut Sudaryono (2017, 207) dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian, angket atau kuesioner merupakan suatu teknik atau cara pengumpulan data tidak langsung. Instrumen atau alat pengumpulan datanya juga disebut angket berisi sejumlah pertanyaan atau pertanyaan yang harus dijawab atau direspons oleh responden.

D. Definisi Operasional Variabel

Menurut Nyoman Dantes (2012, 166) dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian. Definisi operasional variabel menyangkut pengukuran variabel tersebut, dan pernyataan peringkat/skala data yang dikumpulkan (nominal, ordinal, interval, atau rasio). Definisi variabel ini akan sangat

menentukan bagaimana suatu instrumen variabel itu dirancang dan bagaimana rancangan data tersebut dikumpulkan.

Data yang dikumpulkan untuk penelitian ini terdiri dari dua kategori : variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen diwakili oleh kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan variabel independen diwakili oleh jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan dan kesadaran membayar pajak. Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Variabel Terikat

Menurut Sudaryono (2017, 154) dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian. Variabel terikat sering disebut sebagai variabel output, kriteria, konsekuen. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini variabel terikat yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

a. Kepatuhan Wajib Pajak

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Dalam mendefinisikan kepatuhan perpajakan membagi kepatuhan perpajakan menjadi dua kategori (OECD, 2008 dalam Pasaribu dan Tjen, 2016) :

- a. Kepatuhan administratif, yakni kepatuhan terhadap peraturan administratif yang diukur dengan kepatuhan dalam

menyampaikan laporan dan membayar pajak. Kepatuhan administratif ini dikenal kepatuhan formal.

- b. Kepatuhan teknis, yakni kepatuhan yang mengacu pada perhitungan jumlah beban pajak secara benar. Kepatuhan teknis ini dikenal dengan kepatuhan material.

2. Variabel Bebas

Menurut Sudaryono (2017, 154) dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian, variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat. Variabel Bebas adalah variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel yang lain. Dalam penelitian ini variabel bebas yang digunakan adalah :

X_1 = Jenis Kelamin

X_2 = Usia

X_3 = Tingkat Pendidikan

X_4 = Kesadaran Membayar Pajak

a. Faktor Demografi

Variabel demografi diukur dengan menggunakan pertanyaan sederhana yaitu beberapa pertanyaan identitas responden seperti :

1. Jenis kelamin (X_1) dibedakan menjadi laki-laki dan perempuan.

2. Usia (X2) yang diklasifikasikan muda dan tua dimana umur 30 tahun kebawah dikategorikan muda dan 31 tahun keatas dikategorikan tua.
3. Tingkat Pendidikan (X3) di bagi menjadi tinggi dan rendah. SMA kebawah dikategorikan pendidikan rendah sedangkan D3 keatas dikategorikan pendidikan tinggi.

3. Skala Pengukuran

Skala yang digunakan untuk mengukur Jenis Kelamin, Usia dan Tingkat Pendidikan adalah Skala Nominal, Menurut Sudaryono (2017, 125) dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian. dimana Skala Nominal adalah skala yang paling sederhana disusun menurut jenis (kategorinya) atau fungsi bilangan hanya sebagai symbol untuk membedakan sebuah karakteristik dengan karakteristik lainnya. Skala pengukuran dilihat dalam Tabel – tabel dibawah ini :

Tabel III.1

Jenis Kelamin

Skala Nominal

No	Jenis Kelamin	Simbol
1	Laki – laki	1
2	Perempuan	2

Sumber : Ridho Sarasdiyanto (2017)

Tabel III.2
Usia
Skala Nominal

No	Usia	Simbol
1	< 30 Tahun (Muda)	1
2	>31 Tahun (Tua)	2

Sumber : Ridho Sarasdiyanto (2017)

Tabel III.3
Tingkat Pendidikan
Skala Nominal

No	Pendidikan	Simbol
1	< SMK (Rendah)	1
2	>D3 (Tinggi)	2

Sumber : Ridho Sarasdiyanto (2017)

Menurut Sudaryono (2017, 190) dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian. Skala yang digunakan untuk mengukur kesadaran membayar pajak dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah Skala *Likert*. Skala ini digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok tentang kejadian atau gejala sosial. Dengan menggunakan Skala *Likert*, maka variabel yang akan diukur dijabarkan

menjadi dimensi, dimensi dijabarkan menjadi indikator – indikator yang dapat diukur. Skala Pengukuran dapat dilihat pada Tabel III.4 dibawah ini :

Tabel III.4

Skala Likert

Kesadaran dan Kepatuhan

No	Jenis Jawaban	Bobot
1	STS = Sangat Tidak Setuju	1
2	TS = Tidak Setuju	2
3	N = Netral	3
4	S = Setuju	4
5	SS = Sangat Setuju	5

Sumber : Ridho Sarasdiyanto (2017)

Tabel III.5

Operasional Variabel

No	Variabel	Indikator	Sumber	Skala
		1. Sebagai Wajib Pajak, saya sudah melakukan pembukuan atau pencatatan dengan benar. 2. Sebagai Wajib Pajak, saya telah menghitung pajak terutang dengan benar dalam SPT (

		Surat Pemberitahuan).		
1.	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	<p>3. Saya menyampaikan SPT ke kantor pajak dengan tepat waktu sebelum batas akhir penyampaian SPT</p> <p>4. Saya bersedia memenuhi kewajiban atas tunggakan pajak selama ini, jika ada</p> <p>5. Saya selalu membayar kekurangan pajak yang ada sebelum dilakukan pemeriksaan.</p> <p>6. Saya tidak pernah melakukan kejahatan di bidang perpajakan.</p> <p>7. Saya bersedia memberikan data yang diperlukan dalam proses pemeriksaan pajak</p> <p>8. Saya akan membantu kelancaran proses</p>	Ridho Sarasdiyanto (2017)	Skala <i>Likert</i>

		pemeriksaan pajak bila diperiksa oleh petugas pajak		
2.	Jenis Kelamin (X1)	1. Laki – laki 2. Perempuan	Ridho Sarasdiyanto (2017)	Skala Nominal
3.	Usia (X2)	1. < 30 Tahun (Muda) 2. > 31 Tahun (Tua)	Ridho Sarasdiyanto (2017)	Skala Nominal
4.	Tingkat Pendidikan (X3)	1. < SMK (Rendah) 2. > D3 (Tinggi)	Ridho Sarasdiyanto (2017)	Skala Nominal
		1. Pajak adalah sumber dana terbesar bagi negara. 2. Saya telah melaksanakan kewajiban perpajakan dengan sukarela. 3. Saya dengan sukarela mendaftarkan diri untuk		

		memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).		
		4. Membayar pajak merupakan salah satu bentuk pengabdian saya kepada negara	Ridho	Skala
5.	Kesadaran Membayar Pajak (X4)	5. Saya tidak melakukan manipulasi penghasilan agar beban pajak yang harus saya tanggung tidak terlalu besar 6. Dengan membayar pajak berarti saya ikut mewujudkan sistem gotong royong nasional. 7. Dengan membayar pajak, dapat membantu dalam usaha mengurangi tingkat kemiskinan. 8. Bagi saya membayar pajak penghasilan untuk masyarakat yang sudah	Sarasdiyanto (2017)	<i>Likert</i>

		<p>berpenghasilan diatas</p> <p>Penghasilan Tidak Kena</p> <p>Pajak (PTKP)</p> <p>merupakan suatu</p> <p>kewajiban.</p> <p>9. Saya merasa perlu</p> <p>membayar pajak karena</p> <p>teman – teman atau</p> <p>kerabat saya melakukan</p> <p>hal yang sama (taat</p> <p>membayar pajak).</p> <p>10. Rakyat akan taat pajak</p> <p>jika keuangan negara</p> <p>dikelola dengan tertib,</p> <p>efisien,transparan, dan</p> <p>bertanggung jawab.</p>		
--	--	---	--	--

Sumber : Data diolah Penulis (2018)

E. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut Edi Riadi (2014, 33) dalam bukunya yang berjudul Metode Statistik Parametrik & Nonparametrik. Populasi adalah sebuah wilayah atau tempat objek/subjek yang diteliti, baik orang, benda, kejadian, nilai maupun hal – hal lain yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu untuk

mendapatkan sebuah informasi. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang sudah memiliki NPWP yang bekerja di PT. Indah Putih Cemerlang tahun 2018 yaitu sebanyak 85 orang.

2. Sampel

Menurut Sugiyono (2017, 137) dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian. Dalam penelitian kuantitatif, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi tersebut, apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus representatif (mewakili).

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan metode *nonprobability sampling* yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel Menurut Edi Riadi (2014, 36) dalam bukunya yang berjudul Metode Statistik Parametrik & Nonparametrik. Dalam penelitian ini digunakan sampling jenuh yaitu teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Maka jumlah responden pada penelitian ini adalah sebanyak jumlah populasi yaitu 85 orang.

F. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah survey langsung dengan memberikan kuesioner pada responden wajib pajak orang pribadi yang berada di PT. Indah Putih Cemerlang Wilayah Tangerang. Pada penelitian ini kuesioner yang diberikan berisi sejumlah

pertanyaan yang harus dijawab oleh responden untuk mengukur kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

G. Teknik Analisis Data

1. Uji Kualitas Data

Selanjutnya untuk mengetahui kualitas kuisisioner dilakukan uji Validitas dan Reliabilitas. Penjelasan kedua uji tersebut adalah sebagai berikut :

a. Uji Validitas

Menurut Husein Umar (2013, 59) dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis. Validitas dalam penelitian dijelaskan sebagai suatu derajat ketepatan alat ukur penelitian tentang isi atau arti sebenarnya yang diukur, Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuisisioner dikatakan valid jika pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuisisioner tersebut. Pada penelitian ini pengujian validitas menggunakan *Pearson Correlation* yaitu dengan cara menghitung korelasi antara nilai yang diperoleh dari pertanyaan-pertanyaan. Suatu pertanyaan dikatakan valid jika tingkat signifikasinya berada dibawah 0,05 Menurut Imam Ghazali (2012, 52) dalam bukunya yang berjudul Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 20.

b. Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah derajat ketepatan, ketelitian atau keakuratan yang ditunjukkan oleh instrumen pengukuran Menurut Husein Umar (2013, 58) dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis. Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dipercaya atau dapat diandalkan. Keandalan pengukuran dengan menggunakan *Alfa Cronbach* adalah koefisien keandalan yang menunjukkan seberapa baiknya item atau butir dalam suatu kumpulan secara positif berkorelasi satu sama lain. Instrumen dapat dikatakan reliabel apabila memiliki nilai *cronbach's alpha* lebih dari 0,60 Menurut Juliansyah Noor (2014, 25) dalam bukunya yang berjudul Analisis Data Penelitian Ekonomi dan Manajemen.

Jika *cronbach's alpha* $< 0,6$ maka reliabiliti dikatakan buruk

Jika *cronbach's alpha* $0,6 - 0,77$ maka reliabiliti dikatakan cukup

Jika *cronbach's alpha* $> 0,8$ maka reliabiliti dikatakan baik

2. Analisis Deskriptif Statistik

Menurut Sugiyono (2017, 232) dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Statistik Deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

Termasuk dalam statistik deskriptif antara lain adalah penyajian data melalui tabel, grafik, diagram lingkaran, pictogram, perhitungan modus, median, mean, perhitungan desil, persentil, perhitungan penyebaran data melalui perhitungan rata-rata dan standar deviasi, perhitungan presentase. Dalam statistik deskriptif juga dapat dilakukan mencari kuatnya hubungan antara variabel melalui analisis korelasi, melakukan prediksi dengan analisis regresi, dan membuat perbandingan dengan membandingkan rata-rata data sampel atau populasi.

3. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik merupakan cara untuk mengetahui apakah model regresi yang diperoleh dapat menghasilkan estimator linier yang baik. Jika telah memenuhi asumsi klasik, berarti model regresi ideal (tidak biasa) (*Best Linier Unbias Estimator/ BLUE*). Terdapat beberapa asumsi yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum menggunakan *Multiple Linear Regression* sebagai alat untuk menganalisis pengaruh variabel-variabel yang diteliti. Uji asumsi klasik ini terdiri dari uji normalitas data, uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas.

a. Uji Normalitas

Menurut Imam Ghazali (2012, 160) dalam bukunya yang berjudul *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 20*. Uji

normalitas bertujuan apakah dalam model regresi variabel dependen dan variabel independen mempunyai kontribusi atau tidak. Model regresi yang baik adalah data distribusi normal atau mendekati normal.

Menurut Duwi Priyatno (2010, 36-40) dalam bukunya yang berjudul Teknik Mudah dan Cepat Melakukan Analisa Data Penelitian untuk SPSS 20. Uji Normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data terdistribusi dengan normal atau tidak. Uji Normalitas menggunakan metode *Kolmogorov-Smirnov Z* dengan pengambilan keputusan yaitu :

- a. Jika Signifikan $> 0,05$ maka data berdistribusi normal
- b. Jika Signifikan $< 0,05$ maka data tidak berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinieritas

Menurut Imam Ghazali (2012, 105) dalam bukunya yang berjudul Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 20. Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah suatu model regresi terdapat korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Dalam penelitian ini uji multikolinieritas dilakukan dengan melihat nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dan nilai *Tolerance*. Adapun kriteria pengujian multikolinieritas adalah sebagai berikut :

- a. Jika nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) < 10 dan nilai *Tolerance* $> 0,10$ maka artinya tidak terjadi Multikolinieritas terhadap data yang di uji

- b. Jika nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) > 10 dan nilai *Tolerance* $< 0,10$ maka artinya terjadi Multikolinieritas terhadap data yang di uji

c. Uji Heteroskedastisitas

Menurut Imam Ghozali (2012, 139) dalam bukunya yang berjudul *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 20*. Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas terjadi apabila tidak adanya kesamaan deviasi standar nilai variabel dependen pada setiap variabel independen. Bila terjadi gejala heteroskedastisitas akan menimbulkan akibat varians koefisien regresi menjadi minimum dan *confidence interval* melebar sehingga hasil uji signifikansi statistik tidak valid lagi.

4. Analisis Regresi Linear Berganda

Menurut Sugiyono (2017, 305) dalam bukunya yang berjudul *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Analisis Regresi Ganda digunakan untuk meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen, bila dua atau lebih variabel independent sebagai faktor predictor dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya) jadi analisis regresi ganda akan dilakukan bila jumlah variabel independennya minimal dua. Analisis ini

dilakukan untuk meneliti apakah ada hubungan sebab akibat antara kedua variabel, yaitu dengan melihat pengaruh jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan dan kesadaran membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Adapun rumus yang digunakan adalah:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

α = Bilangan konstanta

X_1 = Jenis Kelamin

X_2 = Usia

X_3 = Tingkat Pendidikan

X_4 = Kesadaran Membayar Pajak

e = *Standart Error*

β = Koefisien Regresi untuk masing-masing variabel independen.

5. Koefisien Determinasi (R^2)

Menurut Imam Ghozali (2012, 97) dalam bukunya yang berjudul Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 20. Koefisien Determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel - variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel independen amat terbatas. Nilai yang mendekati variabel-variabel

independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

6. Uji Hipotesis

Penelitian ini juga menggunakan uji hipotesis. Data diperoleh dari hasil pengumpulan data di atas dapat diproses sesuai dengan jenis data kemudian disajikan dalam bentuk tabel dan angka metode statistik sebagai berikut:

a. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Menurut Imam Ghazali (2012, 98) dalam bukunya yang berjudul Aplikasi Analisis Multivariate dengan Pro

gram IBM SPSS 20. Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Dasar pengambilan keputusan digunakan dalam uji t adalah sebagai berikut:

1. Jika nilai probabilitas signifikansi $> 0,05$, maka hipotesis ditolak. Hipotesis ditolak mempunyai arti bahwa variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
2. Jika nilai probabilitas signifikansi $< 0,05$, maka hipotesis diterima. Hipotesis tidak dapat ditolak mempunyai arti bahwa variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

b. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Menurut Imam Ghazali (2012, 98) dalam bukunya yang berjudul Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 20. Uji statistik

F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Untuk menguji hipotesis ini digunakan statistic F dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut :

1. Jika nilai F lebih besar dari 5 maka H_0 ditolak pada derajat kepercayaan 5% dengan kata lain kita menerima hipotesis alternative, yang menyatakan bahwa semua variable independen secara serentak dan signifikan mempengaruhi variable dependen.
2. Membandingkan nilai F hasil perhitungan dengan F menurut table. Bila nilai Fhitung lebih besar dari pada nilai Ftabel, maka H_0 ditolak dan menerima H_a .

